

Treasury

Indonesia



BLU Bersinergi Pulihkan Ekonomi

BLU dan Peran Aktif
Lokomotif Pemulihan
Negeri

Ditjen Perbendaharaan
Sigap Kawal BLU



HANDAL

Harmonis

Amanah

Digital

Akuntabel

Loyal

Harmonis

Memiliki komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan sikap menghargai perbedaan, untuk bersama-sama menjalankan tugas demi tercapainya visi dan misi organisasi

Amanah

Menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan tepat sasaran, dengan berorientasi pada hasil terbaik.

Digital

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis, untuk penyempurnaan layanan perbendaharaan yang unggul dan berkualitas.

Akuntabel

Memastikan seluruh pekerjaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku.

Loyal

Memiliki tekad dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi, serta sanggup mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

*New DJPb
in Town*



Follow me on Instagram
[@ditjenperbendaharaan](#)



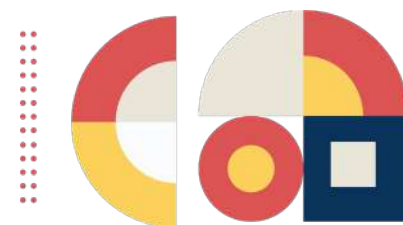
follow me on twitter
[@DJPbKemenkeu_RI](#)



find me on facebook
[@DJPbKemenkeu.RI](#)



follow me on youtube
[DJPb.KemenkeuRI](#)



WAWANCARA16

BLU Bersinergi Perkuat Pemulihan Ekonomi

PIP Sediakan Akses Permodalan, Bantu Masyarakat Lebih Sejahtera

PTN BLU Dukung Pengembangan UMKM untuk Bangkitkan Perekonomian

RS BLU Terus Berinovasi untuk Pemerataan Kualitas Layanan Kesehatan

DINAMIKA22

BLU Kesehatan, Sebuah Kebutuhan di Papua Barat

Fleksibilitas BLU Untuk Peningkatan Layanan

Tarif dan Remunerasi, Pendukung Akselerasi Layanan BLU

Cakrawala	6
Rekam Peristiwa	8
Resensi Buku	37
<i>English Lounge</i>	38
Gapura	40
Pelita	44
Persona	45
Lensa	48
<i>Community</i>	49
Catatan ringan	50

LIPUTAN UTAMA10



BLU dan Peran Aktif Lokomotif Pemulihan Negeri

PENGARAH: Direktur Jenderal Perbendaharaan

PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

REDAKTUR: Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokoler, Kepala Subbagian Publikasi Cetak Bagian Manajemen Publikasi Biro KLI, Leila Rizki Niwanda

PENYUNTING/EDITOR PELAKSANA: Dinar Rafikhalif, Mahardika Argha Mariska, Tino Adi Prabowo, Sugeng Wistriono, Imam Nur Arifin, Firman Imam Santoso, M. Bahrul Ulum, Rachmat Prasetyo Utomo, Aryo Pinandhito Birowo

DESAIN GRAFIS: M. Andika Amin Suhada

FOTOGRAFER: Agung Ari Wibowo, Resha Aditya Pratama

KONTRIBUTOR TULISAN/PENULIS: Catur Ariyanto Widodo, Bayu Andy Prasetya, Eko Hartono Hadi, Muhammad Rusna, Syahri Azda Putra, Kiran, Sulamto Singgih Partono, Cahyo Nugroho, Aditia, Abd. Gafur, Laode Atthar Alfikry, Rino Dwiyanto

SEKRETARIAT: Nuning Dewi Murni, Novryan Noor Hanifan Muttajaqien, S. Salim Thalib, Styo Kurniadi, Andana Levi Mutiandra, Aninda Wahyu Prabandini

Majalah *Treasury* Indonesia menerima kiriman tulisan/naskah yang dimuat pada terbitan berikutnya (rubrik dinamika/opini). Disediakan apresiasi bagi tulisan/naskah yang dimuat. Naskah dapat dikirimkan langsung maupun via email ke alamat Redaksi Majalah *Treasury* Indonesia: Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3449230 Ext.52117/52118 Fax. (021) 3811911 Kotak Pos 1173. Email: redaksi.treasury@gmail.com Website: www.djpb.kemenkeu.go.id. Kritik dan saran dapat disampaikan via email ke alamat Redaksi tersebut di atas.

OPINI32

BLU PIP dan Harapan Indonesia Bebas Rentenir

Mempertajam Penilaian Keuangan BLU dari Aspek *Financial Vulnerability*



The Treasurer

Para pembaca yang budiman,



Pada penghujung tahun 2021 ini, ada baiknya kita menilik kembali perjalanan setahun terakhir. Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari pemerintah masih melanjutkan dukungan terhadap program pemulihan ekonomi nasional. Berbagai layanan, bantuan, subsidi, dan insentif diberikan untuk mengendalikan Covid-19, menolong masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, juga mengungkit kebangkitan sektor usaha agar menggerakkan perekonomian nasional.

Salah satu langkah pemerintah untuk menangani dampak pandemi adalah melalui Badan Layanan Umum (BLU). BLU sejak awal dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai fleksibilitas, tanpa mengutamakan keuntungan. Jumlah BLU terus meningkat hingga saat ini menyentuh angka 252. Angka ini didominasi BLU bidang ke kesehatan dan pendidikan yang memegang peranan penting dalam menangani pasien maupun menjaga

kualitas sumber daya manusia. Terdapat pula BLU yang mengelola pembiayaan dan menyediakan pendampingan bagi sektor usaha kecil yang terimbas oleh perlambatan ekonomi.

Sebagai agen pemerintah, BLU perlu berinovasi dengan tetap berfokus pada layanan. Upaya ini tentu bukan tanpa tantangan, apalagi di tengah perkembangan teknologi dan adaptasi dalam transisi menuju endemi. Untuk menghadapinya, diperlukan sinergi antar-BLU maupun antar-Kementerian dan Lembaga pembina BLU.

Sajian Majalah *Treasury* Indonesia pada Volume IV Tahun 2021 ini akan mengulas berbagai inovasi dan sinergi yang telah dilakukan oleh BLU, sekaligus peranan Ditjen Perbendaharaan yang mendapatkan mandat untuk menjalankan fungsi perumus kebijakan dan pembina dalam pengelolaan keuangan BLU.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhai upaya kita.

Salam Treasury,

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto



Majalah Treasury Indonesia merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Memberikan informasi terkini seputar pengelolaan keuangan negara dan informasi perbendaharaan didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya

Majalah Treasury Indonesia saat ini juga dapat dibaca dan diunduh secara online melalui website resmi djpb.kemenkeu.go.id, atau **scan di sini:**

MK Corner

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati



Pemerintah yang memiliki tugas pokok melayani masyarakat dapat membentuk dan menerapkan pola keuangan yang lebih fleksibel. Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas dan fokus kepada produktivitas, efisiensi, dan efektivitas untuk melayani masyarakat. BLU boleh memungut biaya sesuai dengan standar layanannya. Tujuannya bukan *profit making*, melainkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai fleksibilitas ini tetap diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Rumah sakit-rumah sakit dan perguruan tinggi BLU merupakan jendela di bidang pendidikan dan kesehatan, dua hal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. RS BLU hanya 3 persen dari 3.102 rumah sakit dan pelayanan kesehatan, tetapi melayani 15 persen lebih dari total pasien yaitu 5,6 juta. Perguruan tinggi BLU jumlahnya hanya 101, atau 2,9 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia, tetapi menerima dan melayani sebanyak 1,6 juta mahasiswa atau 25 persen. Ini menggambarkan peranannya luar biasa besar. Oleh karena itu kualitas pengelolaan BLU menjadi pertaruhan karena diandalkan oleh masyarakat. Kualitasnya tidak hanya dinilai dari sisi tata kelola keuangan, tetapi juga pelayanan.

Kita akan terus berupaya agar BLU menjadi institusi yang memberikan pelayanan yang makin *affordable*, *available*, serta *sustainable*. Masyarakat yang memerlukan pelayanan bisa menjangkau, keberadaannya harus cukup merata, dan dari sisi keuangan harus *sustainable*. BLU juga harus berinovasi agar menjadi institusi yang tata kelolanya baik sekaligus kreatif, serta terus memberikan pelayanan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengelolaannya juga harus tetap akuntabel dan transparan sebagai bagian upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan negara yang baik.

Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Caranya dengan memberikan yang terbaik, salah satunya BLU yang memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam Opening Ceremony BLU Expo 2021, 16 November, di GBK Jakarta





Kesehatan

Pengelolaan rumah sakit di bawah BLU yang sudah modern berperan penting di masa pandemi, memberikan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta mampu bergerak cepat beradaptasi menghadapi berbagai kondisi gawat selama pandemi Covid-19.

Berbagai inovasi layanan serta ditunjang dengan peralatan medis yang baru oleh rumah sakit di bawah naungan BLU menjadi hal positif yang akan memberikan semangat baru dalam pengelolaan fasilitas kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.

Foto Finalis Lomba Foto BLU 2021:

1. Kapten CKM dr. Ivan Paulus
2. Mawaruddin
3. Soliman Nur Setia
4. Wawan Hendra Gunawan
5. I Made Adi S



Peran KSAP di Balik Raihan Opini WTP LKPP | 6/10

Pelaporan Keuangan RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya merupakan salah satu bukti keberhasilan dari peran Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Peringatan Hari Jadi KSAP ke-17 Tahun 2021.



Manfaatkan Data Analytics, Tingkatkan Kualitas Pengelolaan APBN | 07/10

Data akan bermanfaat hanya jika diolah, menjadi masukan penting untuk membuat keputusan maupun pengambilan kebijakan (*evidence-based policy*).

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto dalam acara *Grand Launching DJPb Data Analytics Competition (DDAC)*.

Ditjen Perbendaharaan Kembali Serahkan Hibah BMN untuk Lembaga Sosial | 27/10

Dalam hibah BMN tahun ini, kami distribusikan BMN sebanyak 901 unit dengan total nilai perolehan sebesar Rp2.857.826.068,00 kepada 23 lembaga sosial masyarakat di wilayah Jabodetabek, Banyumas, Brebes dan Purworejo.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choeroel dalam acara serah terima hibah BMN



Menkeu: DJPb Duduk di Atas Data Ekonomi yang Luar Biasa | 9/11

Ditjen Perbendaharaan memiliki potensi besar untuk mempertajam analisis ekonominya dengan optimalisasi pengelolaan data.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb 2021.





DJPb Raih Juara Umum BMN Awards 2021 | 20/11

Ditjen Perbendaharaan meraih penghargaan sebagai Juara Umum Barang Milik Negara (BMN) Awards 2021 di lingkungan Kementerian Keuangan.



HAI-DJPb Raih Penghargaan Kategori Perak SNI Award 2021 | 18/11

Ditjen Perbendaharaan melalui HAI-DJPb meraih penghargaan kategori perak untuk organisasi kecil jasa pada penganugerahan SNI Award (*The National Quality Award of Indonesia*) ke-16 tahun 2021 dari Badan Standardisasi Nasional di Jakarta.

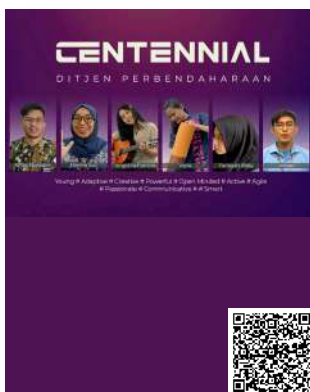


BLU Expo 2021 | 16/11

Rumah sakit dan perguruan tinggi termasuk bagian BLU di bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan dua hal paling penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Kedua bidang BLU tersebut memiliki kontribusi besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam acara BLU Expo 2021

DESEMBER



Optimalkan Keunggulan Digital Native pada Generasi Centennial DJPb | 9/12

DJPb akan terus membangun *environment* dan ekosistem yang memungkinkan semua bakat dan kemampuan centennial ini dapat terakomodasi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto dalam acara Treasury Lounge



Dukung Pembiayaan Perumahan, Pemerintah Lakukan Perjanjian Investasi dengan BP Tapera | 22/12

Perjanjian investasi pengelolaan dana FLPP adalah awal dari sinergi pengelolaan pembiayaan perumahan yang akan dikelola oleh BP Tapera

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto dalam acara Penandatanganan Perjanjian Investasi Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara Kemenkeu dan BP Tapera



Tahun 2021, Lima puluh satu unit kerja DJPb berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM | 20/12

Tahun ini, sebanyak 51 unit kerja DJPb memperoleh predikat WBK/WBBM:

- WBK sebanyak 42 unit kerja
- WBBM sebanyak 9 unit kerja.

Capaian tersebut mengantarkan kembali DJPb sebagai unit berpredikat WBK/WBBM terbanyak di lingkup Kementerian Keuangan selama dua tahun berturut-turut.

BLU dan Peran Aktif Lokomotif Pemulihan Negeri

Sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah menghadirkan Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan agen pemerintah yang diberikan fleksibilitas agar lebih luwes dan lincah dalam semangat enterprising the government, dengan kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi bukan menjadi tujuan utama.

BLU menyajikan berbagai layanan dasar, menyediakan program perlindungan sosial, serta mengembangkan inovasi untuk layanan yang mendukung pembangunan nasional. BLU juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi APBN, dapat dilihat dari pendapatan BLU yang tumbuh rata-rata 22 persen dan mempunyai kontribusi rasio sekitar 10,5 persen dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) nasional. Saat pandemi Covid-19 melanda, BLU bukan hanya memegang peranan penting, bahkan bisa dikatakan turut menjadi lokomotif pemulihan negeri.

Rumah Sakit (RS) BLU telah melayani lebih dari 80 persen pasien BPJS, sebanyak 90 persen RS BLU menjadi RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19, dan tercatat selama tahun 2020 RS BLU menangani 34 juta pasien Covid-19. Dari bidang pendidikan, 106 BLU atau 2,96 persen dari jumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia telah memberikan kontribusi untuk menjaga kualitas sumber daya manusia agar tetap unggul dan berdaya saing tinggi.

Program Pengentasan Kemiskinan melalui BLU



4,48 juta Debitur

Rp14,7 Triliun

Melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)



28.000 Kelompok Tani Hutan

Rp1,5 Triliun

Melalui BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)



1,15 juta Debitur Koperasi dan UMKM

Rp13,3 Triliun

Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)



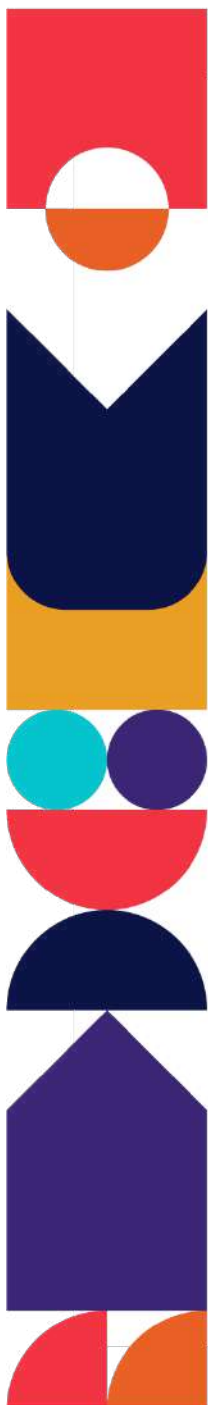
18.800 Debitur Usaha Kelautan/Perikanan

Rp742,7 Miliar

Melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)



KONTRIBUSI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)



Pendidikan

Proporsi PTN BLU yang hanya 2,96% dari jumlah PT, mampu mendidik 25,45% mahasiswa

Kesehatan

Jumlah RS BLU 3,06% dari total RS di Indonesia tetapi berkontribusi 15,4% layanan RS di Indonesia.

Pengentasan Kemiskinan

Melalui program pembiayaan seperti UMi, UMKM, Nelayan, petani hutan, MBR, dan Koperasi mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usahanya

Ketahanan Pangan

Penguatan swasembada pangan melalui inseminasi semen ternak dan produksi vaksin.

Ketahanan Energi & Lingkungan

Optimalisasi sumber energi tambang/alam & hayati, serta upaya kelestarian lingkungan dan isu iklim.

Pengembangan Infrastruktur

Mengembangkan kawasan ekonomi dengan kemudahan berusaha, Mengelola daerah pariwisata dan layanan khusus, Menyiapkan jaringan komunikasi pada daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal).

Hubungan Internasional

Meningkatkan hubungan bilateral dengan pemberian hibah kepada negara lain.





Ditjen Perbendaharaan Sigap Kawal BLU

Dalam mendorong kontribusi BLU sesuai bidang tugasnya, terdapat peran krusial Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina BLU. Sejak tahun 2006, Direktorat PPK BLU menjadi konduktor dalam orkestra BLU agar BLU dapat bergerak harmonis, sinergi, dan terpadu dalam menghasilkan kontribusi dan kolaborasi nyata kepada negeri ini.

Sederetan inovasi dibangun oleh Direktorat PPK BLU. Salah satunya adalah BLU Integrated Online System (BIOS), yang merupakan sistem informasi BLU berbasis teknologi informasi untuk digitalisasi proses bisnis yang terintegrasi, tepat waktu, akurat, dan mengurangi penggunaan kertas. BIOS juga dilengkapi dengan fitur *analytical*. Dari segi kebijakan, terdapat PMK 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU yang juga disebut sebagai PMK BLU Sempel. Fasilitas transfer kas antar-BLU juga diakomodasi untuk saling membantu antar-BLU, khususnya pada saat pandemi di mana kondisi perekonomian dapat berdampak pada kondisi keuangan BLU.

Untuk mengukur kematangan manajemen dalam mengelola BLU yang berbasis proses, dikembangkan *Maturity Rating* BLU yang merupakan penyempurnaan dari model penilaian kinerja. Lewat hasil penilaian ini, dapat diketahui *area improvement* yang dapat dilakukan BLU berikut strategi pembinaannya secara tepat.





252

BLU tersebar di seluruh Indonesia saat ini

“BLU harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, waktu, dan proses bisnis. Terlebih di tengah pandemi, BLU dapat memberikan respons cepat dalam meningkatkan penyediaan pelayanan yang *affordable*, *available*, serta *sustainable* untuk menghadapi kondisi *new normal*”

BLU Expo, Jembatan Sinergi untuk Pulihnya Negeri

Sebagai sarana pemererat sinergi antar-BLU dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan layanan BLU, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan BLU Expo yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 16 November 2021. Expo ini dirancang dalam bentuk pameran virtual yang dapat dikunjungi melalui portal *e-blu.id*. Format expo virtual yang lebih interaktif dengan format 3D digelar selama tiga hari pada awal penyelenggaraan acara, sedangkan versi *website*-nya masih dapat diakses hingga akhir bulan Desember 2021.

Acara pembukaan BLU Expo dihadiri pula oleh para menteri dan pimpinan lembaga atau yang mewakili, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

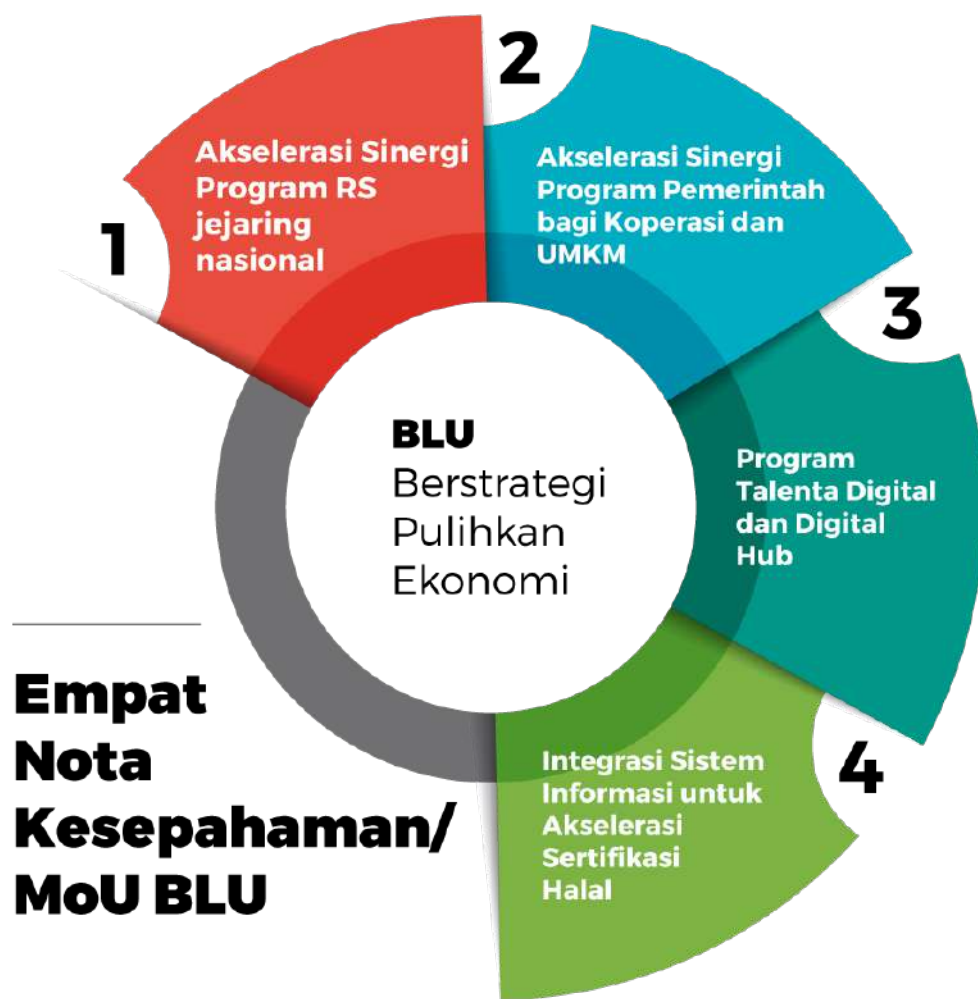
Selain penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU), diselenggarakan pula 15 *talk show* dan webinar sebagai sarana berbagi wawasan dan pengalaman antar-BLU dan masyarakat sebagai pengguna layanan. BLU Expo juga menjadi momentum peluncuran logo dan *values* BLU yang me-

nguatkan identitas BLU sebagai agen pemerintah berorientasi kepada peningkatan pelayanan bagi masyarakat. *Values* dari BLU yaitu Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan Digital (SPEED) diharapkan menjadi dasar dari akselerasi gerak BLU agar dapat lebih kuat lagi melayani masyarakat.

Seperti disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto, sebagai agen pemerintah, BLU perlu memberikan *extra effort* dan berinovasi untuk penanganan pandemi, juga mengembangkan layanan dengan pembiayaan alternatif, *link and match* dengan kebutuhan industri, hingga optimalisasi aset, digitalisasi layanan, dan inklusi finansial.

“Langkah-langkah ini tetap harus berfokus pada layanan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden bahwa pengelolaan BLU harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau. Arahan tersebut dikuatkan kembali oleh Menteri Keuangan yang menyatakan BLU harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, waktu, dan proses bisnis. Terlebih di tengah pandemi, BLU dapat memberikan respons cepat dalam meningkatkan penyediaan pelayanan yang *affordable*, *available*, serta *sustainable* untuk menghadapi kondisi *new normal*,” jelas Dirjen Perbendaharaan.





Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan adaptasi dalam transisi kondisi pandemi menuju endemi, diperlukan sinergi antar-BLU maupun antar-Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi pembina BLU.

“Berbagai MoU (pada saat BLU *Expo*) bertujuan supaya BLU-BLU bersinergi, demikian juga dengan Kementerian Negara/Lembaga pembinaanya. Karena dengan sinergi maka hasilnya akan jauh lebih baik dan *powerful*. Harapannya, para menteri pimpinan Kementerian Negara/Lembaga makin mendukung pentingnya BLU, sehingga bisa terus membimbing dan meningkatkan pelayanan dan kualitas BLU,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Senada dengan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, menyampaikan harapannya.

“BLU Expo adalah bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk meningkatkan *awareness* dan juga sinergi bagi pelayanan BLU ke depannya. BLU memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai macam layanan pemerintah yang makin terus berkembang. Saya harapkan BLU dapat terus bekerja bagi pelayanan masyarakat Indonesia.”



Kontribusi BLU untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi telah memberikan tantangan yang berat bagi semua negara, termasuk negara kita Indonesia. Memang kita harus bekerja keras untuk menangani masalah kesehatan dan sekaligus masalah ekonominya. Namun, agenda reformasi struktural, penguatan fondasi Pembangunan Jangka Panjang harus tetap dilanjutkan. Saat pandemi kita justru berhasil menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi langkah penting reformasi struktural kita, yang memperbaiki ekosistem investasi, memperbaiki ekosistem penciptaan lapangan kerja, serta memperbaiki ekosistem birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Di saat pandemi, kita mengakselerasi ekonomi digital untuk meningkatkan akses pelaku UMKM untuk menjangkau pasar nasional dan pasar global. Kita juga mempercepat digitalisasi di berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Demikian halnya harapan saya terhadap BLU. Dengan total 252 BLU, jumlah yang sangat besar, yang berada di 21 Kementerian Negara/ Lembaga dengan aset kelolaan sebesar Rp888 triliun dan total pendapatan Rp96 triliun, BLU bisa memberikan kontribusi signifikan untuk

pemulihan ekonomi nasional, sekaligus mendukung reformasi struktural yang sedang kita lakukan.

Peran BLU untuk pemulihan ekonomi diterjemahkan ke dalam layanan nyata yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai sektor. Layanan kesehatan BLU harus dapat menjamin kualitas layanan kesehatan yang profesional yang merata dan terstandarisasi di seluruh di tanah air Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan kualitas terbaik di rumah sakit terdekat. Juga menghadirkan layanan-layanan unggulan berstandar internasional, sehingga menumbuhkan ekosistem wisata kesehatan. Untuk layanan pendidikan, BLU harus sigap merespons perkembangan teknologi mutakhir, menyiapkan sumber daya manusia unggul dalam menghadapi dunia yang serba-digital dan sejalan dengan kebutuhan industri, mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang siap bekerja membangun negara kita dan bersaing di tingkat internasional, sehingga Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi yang dimiliki menuju Indonesia Maju tahun 2045.

Untuk layanan UMKM, BLU harus bisa membawa UMKM naik kelas, *go digital, go international*, memfasilitasi UMKM menuju inklusi keuangan dengan menggunakan teknologi informasi yang terpadu, terus berinovasi menghadirkan konsep-konsep pembiayaan baru guna memperluas layanan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi, serta menngawal UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Presiden RI Joko Widodo dalam Opening Ceremony BLU Expo, 16 November 2021



BLU Bersinergi Perkuat Pemulihan Ekonomi



Ari Wahyuni, Direktur PPK
BLU DJPb

Seiring dengan perkembangan BLU dan aset yang dikelola, tantangan dan risiko pengelolaan BLU makin besar. Harapan kami BLU mampu memberikan layanan prima yang berkualitas, affordable, available, dan sustainable serta dapat bersinergi secara maksimal dalam pencapaian kerjanya.



Beragamnya bidang yang dijalankan oleh instansi pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan BLU ternyata menjadi suatu kekuatan tersendiri ketika menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya. BLU bidang kesehatan, pendidikan, pengelola dana, hingga infrastruktur dan konektivitas dapat bersinergi, bahu-membahu mendukung program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa? Simak penuturan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU DJPb Ari Wahyuni yang dirangkum oleh redaksi Majalah *Treasury* Indonesia.

Bagaimana awal mula BLU dibentuk?

Pemerintah menghadirkan BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU berbeda dengan instansi pemerintah biasa, karena BLU merupakan instansi pemerintah yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta menerapkan pengelolaannya dengan cara bisnis sebagaimana *corporate*. Konsepsi agensifikasi ini juga telah diterapkan di negara-negara lain.

Saat ini terdapat sebanyak 252 BLU di Indonesia. BLU dapat dikatakan sebagai wajah pemerintah karena pada

prinsipnya BLU menyelenggarakan layanan dasar kepada masyarakat, yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan berjalannya waktu, bidang layanan BLU makin kompleks dengan munculnya BLU pengelola dana khusus, pengelola kawasan, dan penyedia barang/jasa lainnya.

Pada saat menghadapi Covid-19 memang program pemerintah termasuk yang dijalankan lewat BLU banyak difokuskan untuk mengatasi pandemi dari sisi kesehatan. Tidak hanya itu, terdapat pula program untuk menolong dan melindungi masyarakat secara sosial dan memulihkan ekonomi dari dampak pandemi. BLU lain pun berperan penting seperti BLU BAKTI dari Kementerian Kominfo untuk konektivitas. Teknologi informasi sangat penting agar Kementerian Kesehatan bisa *men-track* berapa jumlah kasus Covid-19 dan di mana munculnya, berapa orang yang sudah dites, dan berapa orang yang sudah divaksin. Dengan konektivitas yang baik, laporan dapat dihasilkan *just in time*.

BLU juga melakukan berbagai dukungan terhadap pemulihan ekonomi seperti pelaksanaan proyek strategis nasional, penyelesaian 52 jalan tol yang melalui BLU LMAN pembelian tanahnya,

bendungan dan irigasi, 8 jalur kereta api, satu pelabuhan, juga program untuk memulihkan sektor pariwisata. Ada pula BLU yang mengelola bantuan sosial atau bantuan produktif yang berelimen pada bantuan sosial untuk dunia usaha.

Seperti apa Direktorat PPKBLU menjalankan peran membina BLU?

Untuk memastikan BLU dapat berjalan dengan optimal dan memberikan kinerja yang meningkat, dibentuk Direktorat PPKBLU sebagai regulator dan supervisor BLU dari hulu sampai dengan hilir.

Direktorat PPKBLU menyelenggarakan layanan mulai dari penyusunan regulasi dan kebijakan, penetapan satker menjadi BLU, penetapan tarif dan remunerasi, pembinaan dan konsultasi, serta monitoring dan evaluasi. Dalam menyelenggarakan layanan, Direktorat PPKBLU membangun ekosistem yang saling bersinergi. Dimulai dari riset sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Penyusunan kebijakan dari pendirian, tarif, dan tata kelola BLU diupayakan simpel dan mudah dipahami. Kebijakan yang telah disusun kemudian disosialisasikan melalui berbagai cara seperti *focus discussion group* (FGD), seminar, dan *e-learning*. Untuk menjamin implementasi regulasi, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui BLU Integrated Online System (BIOS) serta *maturity rating*. Keseluruhan proses ini didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya?

Dengan fleksibilitas pada satker BLU baik dalam pengelolaan keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa, maupun investasi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengawal pelaksanaannya di lapangan. Sebagai salah satu solusinya, ditetapkanlah kontrak kinerja untuk masing-masing BLU yang selalu kemudian dievaluasi kembali. Dalam upaya membuat evaluasi yang lebih baik dan pencapaian kinerja yang lebih baik, kita membangun *maturity rating*. Dengan *maturity rating* ini kita berharap bisa mendorong para BLU menjadi lebih baik, meningkatkan kinerja, dan memiliki tata kelola yang lebih baik.

Ada lima strategi yang kami lakukan di dalam pelaksanaan tugas untuk mengawal BLU. Pertama,

kami terus berkomitmen dalam menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, kemudahan pelayanan. Kami terus berinovasi untuk menyediakan kemudahan fasilitas yang lebih baik sehingga dapat mempertahankan kepuasan para pengguna layanan dalam hal ini BLU. Yang ketiga, kami membuat program-program berbasis kebutuhan layanan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran BLU di tengah-tengah mereka. Keempat, *monitoring* dan evaluasi bersama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara berkala dan berkelanjutan, untuk memastikan program kerja tetap *on track* dengan integritas yang tetap terjaga. Yang terakhir, kami bersama dengan *stakeholders* menjalankan strategi komunikasi melalui media untuk mendorong *branding* ataupun informasi seputar BLU diketahui dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Kami juga membangun dan melaksanakan sejumlah inovasi layanan. Di antaranya Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU atau disebut dengan PMK BLU Simpel. PMK ini merupakan simplifikasi regulasi BLU dari 15 PMK menjadi satu PMK yang disusun secara sistematis untuk memudahkan *stakeholders* memahami BLU secara utuh, dengan penyempurnaan substansi untuk mendukung stabilisasi ekonomi dan fiskal serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

Apa harapan Ibu untuk BLU ke depannya?

Seiring dengan perkembangan BLU dan aset yang dikelola, maka tantangan dan risiko pengelolaan BLU makin besar sehingga perlu mitigasi yang baik. Tahun 2021 merupakan titik balik perekonomian nasional yang *rebound* kembali positif. Oleh karenanya diperlukan reformasi fundamental guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk di BLU. Harapan kami adalah komitmen BLU, dewan pengawas, dan Kementerian Negara/Lembaga yang telah disepakati dalam kontrak kinerja dapat dilaksanakan dan BLU mampu memberikan layanan prima yang berkualitas, *affordable*, *available*, dan *sustainable* serta dapat mendorong BLU untuk berusaha bersinergi secara maksimal dalam pencapaian kinerjanya melalui penguatan tata kelola, inovasi, dan modernisasi teknologi informasi.



Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU)

BLU merupakan instansi Pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dengan orientasi tidak mengutamakan mencari keuntungan, dikelola semi otonom dengan prinsip efisiensi & produktivitas, diberikan fleksibilitas agar lebih *agile* dalam semangat *enterprising the government*.

Perbandingan Karakteristik Kelembagaan

ASPEK	SATKER	BLU	BUMN
Orientasi	<i>Non Profit</i>	<i>Not For Profit</i>	<i>Profil</i>
Kekayaan/Aset	Tidak dipisahkan	Tidak dipisahkan	Dipisahkan
Pengelolaan	Terpusat	Semi Otonom	Otonom
Regulasi	<i>Governance Rigid</i>	Umum → Regulator Detil → BLU	Umum → Regulator Detil → BUMN
Porsi RM APBN	Semua	Ada Alokasi RM	Penyertaan modal
Tarif	PP	Menkeu (dapat didelegasikan)	BUMN
Pendapatan	Kas Negara	Digunakan langsung	Digunakan langsung
Pengemba-ngan usaha	Tidak ada	Ada	Ada
Surplus	Tidak ada	Dikelola	Dikelola
SDM	ASN	ASN, non-ASN	Non-ASN
Perpajakan	Bukan subjek	Bukan subjek	Subjek

PIP Sediakan Akses Permodalan, Bantu Masyarakat Lebih Sejahtera



Kami menjawab kebutuhan para pelaku usaha ultra mikro yang butuh ditingkatkan keterampilannya, juga dibantu memasarkan dan mengurus legalitas perusahaannya. Oleh karena itu PIP selain menyalurkan pembiayaan juga membantu hal-hal tadi melalui pendampingan yang dilakukan oleh penyalur.

Ririn Kadariyah, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah

Apa saja yang telah dilakukan oleh PIP dalam mendukung usaha ultra mikro?

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) adalah koordinator pendanaan di bidang pembiayaan ultra mikro dengan syarat-syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan pembiayaan dari perbankan, jadi untuk yang masih *unbankable*, dengan nama Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kami menyalurkan Pembiayaan UMi melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), termasuk koperasi. Harapan kami makin banyak koperasi yang bergabung sebagai penyalur UMi sehingga makin banyak pula pelaku usaha mikro yang dapat memperoleh manfaat pembiayaan dari pemerintah. Mulai tahun 2021, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 tahun 2020, PIP bisa menyalurkan pembiayaan UMi melalui koperasi secara langsung sehingga sekarang jalurnya lebih singkat.

Ini sebuah peluang untuk menyalurkan pembiayaan UMi kepada sebanyak mungkin masyarakat. Namun, di sisi lain tantangannya adalah bagaimana bisa mendapatkan koperasi yang siap untuk menjadi penyalur UMi. Jumlah koperasi di Indonesia ada 127 ribu lebih, harus dilihat yang siap, profesional, dikelola dengan baik, sehat, dan modern. Saat ini semua harus mengikuti perkembangan teknologi, termasuk dalam pengelolaan koperasi. Seluruh anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan UMi harus punya NIK dan harus terdata secara rapi. Datanya terhubung langsung dengan database Dukcapil sehingga bisa di-kroscek.

Seperti apa rencana PIP ke depannya untuk makin mewujudkan kehadiran pemerintah dalam mendukung UMKM?

Jumlah pelaku usaha yang skalanya ultra mikro sangat besar. Total pelaku UMKM di Indonesia ada sekitar 64 jutaan, dan sekitar 44 jutanya adalah usaha ultra mikro. Dengan jumlah yang sangat besar ini, ketika kesejahteraan mereka meningkat maka

otomatis juga bisa menyumbangkan tingkat produk domestik bruto (PDB) yang lebih besar dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Sayangnya masih banyak sekali yang belum bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan atau pinjaman, sehingga sering terdengar banyak yang terjerat pinjaman dari rentenir yang mudah mereka akses. Khususnya pada saat pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat yang semula bekerja lalu kehilangan pekerjaan dan menjadi pelaku usaha. Ini yang harus difasilitasi.

Pembiayaan UMi sudah dimulai dari tahun 2017 dan sampai saat ini jumlah masyarakat yang mendapatkan pembiayaan sudah lebih dari 5 juta. Khusus untuk tahun 2021 saja kami ditargetkan menjangkau 1,8 juta pelaku usaha mikro dan sampai November kemarin kami sudah membiayai hampir 1,9 juta pelaku usaha, dengan dana Rp8 triliun sudah digulirkan. Sekarang sudah mencapai hampir Rp17 triliun dana yang digulirkan atau sudah dua kali lipat lebih. Pada akhir tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan tambahan dana lagi Rp2 triliun dari APBN, ini akan menjadi modal yang digulirkan tahun depan. Dengan demikian, harapannya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan permodalan tambahan untuk usahanya.

Kami juga menjawab kebutuhan para pelaku usaha ultra mikro yang bukan hanya masalah permodalan. Mereka juga butuh ditingkatkan keterampilannya, dibantu pemasarannya, kemudian biasanya juga belum memiliki kesadaran untuk mengurus legalitas perusahaannya. Oleh karena itu PIP selain menyalurkan pembiayaan juga membantu hal-hal tadi melalui pendampingan yang dilakukan oleh penyalur. Dengan begitu diharapkan jadi lebih bagus hasil usahanya dan makin lancar pula cicilannya.

Selain pendampingan yang dilakukan oleh penyalur, PIP juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengadakan pelatihan, misalnya pemasaran secara online bekerja sama dengan marketplace. Kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Padjadjaran untuk inkubasi usaha di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Majalengka.

RS BLU Terus Berinovasi untuk Pemerataan Kualitas Layanan Kesehatan



Rumah Sakit BLU terus berinovasi. Layanan kesehatan harus makin baik, cepat, bisa dipantau, juga dipertanggungjawabkan. Kami upayakan agar pasien dan keluarganya nyaman. Harapannya, outcome pasien lebih baik dalam waktu yang lebih cepat.

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, Direktur Utama RSCM

Apa saja inovasi RSCM dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat?

BLU adalah terobosan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kami sebagai Rumah Sakit BLU mendapatkan amanah itu dan terus berinovasi dengan dukungan digitalisasi. Layanan kesehatan harus makin baik, cepat, bisa dipantau, juga dipertanggungjawabkan. Kami membangun rekam medis elektronik yang bisa mengintegrasikan semua permintaan dari poliklinik ke unit penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan radiologi melalui sistem. Hasil pemeriksaan dan obat juga bisa didapatkan dengan lebih cepat. Semua dokter bisa melihat rekam medis yang sama dalam waktu yang cepat, sehingga konsultasi lebih mudah. Kami upayakan agar pasien dan keluarganya nyaman, karena keluarga biasanya jadi repot harus ke sana kemari, perlu lama menunggu informasi. Harapannya, *outcome* pasien lebih baik dalam waktu yang lebih cepat.

Bicara sistem, tentu ada *concern* tentang keamanan data. Ini kami lindungi. Dalam membangun sistem, RSCM dikawal oleh banyak komite seperti Komite Mutu, Komite Medik, dan Komite Etik sehingga ada pedomannya. Data berada di server yang aman milik RSCM sendiri, ada *data cloud* sendiri. Dalam telekonsultasi pun kami tidak menggunakan aplikasi *meeting* yang sudah ada, tetapi membangun sendiri. Kami tidak ingin data dimanfaatkan oleh yang tidak berkepentingan. Terdapat juga sistem *back-up* di luar RSCM, kalau-kalau ada gangguan.

Sering dikatakan bahwa kolaborasi adalah salah satu kunci dalam menghadapi era industri 4.0. Apakah RSCM juga menerapkan hal ini?

Kami sudah berkolaborasi dengan BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, BLU di Kementerian Komunikasi dan Informatika-red). Dengan internet yang stabil, RSCM bisa terhubung dengan fasilitas kesehatan di Bangka Belitung dan Sangir Talaud, sehingga melihat dengan jelas kondisi pasien di sana. RSCM bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan di daerah terpencil tersebut, sampai dokter RSCM pun bisa memberikan bimbingan untuk operasi jarak jauh.

Kami membangun digitalisasi secara bertahap. Aplikasi-aplikasi ini akan dikoneksikan menjadi Smart-RSCM yang sedang dalam proses. RSCM juga ingin menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah itu tidak selalu kumuh dan tidak kuno. Di RSCM dalam satu hari pasien di poliklinik bisa 4000 orang. Dengan digitalisasi tidak ada lagi antrean panjang karena sudah bisa secara *online*, pembayaran pun menggunakan *gateway*.

RS BLU juga berperan sebagai pengampu untuk pemerataan kemampuan fasilitas kesehatan di seluruh pelosok Indonesia. Beberapa RS sudah diminta oleh Kemenkes untuk mengampu sesuai bidang keahliannya. Kapasitas atau kompetensi dokter pada fasilitas kesehatan di daerah dapat ditingkatkan melalui konsultasi jarak jauh. Dokter di RS BLU bisa membantu konsultasi pasien melalui sistem sampai mengarahkan, misalnya fasilitas kesehatan tidak punya alatnya maka bisa disarankan ke RS terdekat. Jadi sebetulnya sistem ini terobosan yang besar, sampai bisa dikatakan Babel rasa RSCM, Sangir Talaud rasa RSCM. Di RSCM ada 600 dokter, 160 lebih dokter subspesialis, tetapi mau ke mana-mana juga terbatas. Dengan sistem ini, siapa pun yang ada di pelosok bisa mendapatkan layanan dokter dari RS BLU tanpa harus datang langsung, dan data pasien tetap terus tercatat di rekam medis sehingga ada kesinambungan.

PTN BLU Dukung Pengembangan UMKM untuk Bangkitkan Perekonomian



Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, hadir tantangan sekaligus kesempatan. Bagaimana UNY menyikapi hal ini?

UNY menjadi PTN BLU sejak tahun 2009. Tahun ini, kami berada di peringkat kedua Liga PTN BLU di Indonesia dengan skor tertinggi pada 5 dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dinilai.

Sebagai perguruan tinggi kependidikan, inovasi terus kami upayakan, terutama dalam proses pembelajaran. Kami memiliki *learning management system* (LMS) Be Smart yang membantu mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan mudah. Ada pula Global Access Independence Learning (Glacier), dalam bentuk *massive open online course* (MOOC) di mana materi pembelajaran bisa diikuti oleh perguruan tinggi lain.

Kami juga mengembangkan *computer-based test* (CBT) berbasis domisili, jadi seleksi mahasiswa baru dapat diikuti cukup dari rumah, dengan hasil yang tetap terjamin dari sisi validitas dan reliabilitasnya. Bahkan karena keberhasilan dalam melaksanakan CBT domisili, kami ditunjuk untuk melaksanakan tes berbasis domisili dalam Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru (UP UKM PPG) secara nasional. Kalau peserta harus datang ke lokasi tes maka harus ada tes *swab*, dan jika ada 15 atau 18 ribu peserta lalu biaya *swab* Rp300 ribu, artinya perlu Rp4,5 miliar dan ini bisa dihemat.

Saat ini dampak pandemi masih sangat terasa di berbagai bidang. Bagaimana UNY sebagai PTN BLU turut mengambil peran dalam mengatasi dampak pandemi?

Sebagai perguruan tinggi kependidikan, inovasi terus kami upayakan, terutama dalam proses pembelajaran. UNY juga memiliki inkubator bisnis di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Harapan kami, bisa mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Prof. Edi Purwanta, Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

UNY juga memiliki inkubator bisnis di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Total telah sebanyak 64 *start up* yang didampingi. Model inkubasi diawali dengan pra-inkubasi selama 3 bulan untuk sosialisasi, *bootcamp*, dan rekrutmen. Kemudian dilanjutkan dengan inkubasi selama 24 bulan berupa pendampingan, konsultasi, dan pelatihan baik terkait *business plan*, teknik usaha, manajemen, legalitas usaha, HAKI, sampai pendanaan. Selanjutnya adalah masa pasca-inkubasi 12 bulan untuk pelepasan dan pengembangan jejaring agar *tenant* bisa mandiri dan berdaya saing.

Pembinaan terus dilakukan sampai *tenant* benar-benar bisa mandiri sebagai pengusaha. Kami dukung penyempurnaan produk, bagaimana kemasan layak jual, arah pemasaran, perhitungan omzet dan *benefit*, sampai mendampingi untuk mencari dana pendukung lewat proposal misalnya ke perbankan. Atas upaya ini LPPM UNY meraih Juara III Inkubator Terbaik Nasional 2015 dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Inkubator Terbaik dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2018.

Inovasi produk dari masyarakat yang kami dukung di antaranya produksi jamu, SPD *speedometer*, sepeda listrik niaga, *astrobike*, angklung sistem tuts piano, dan Indobot. Ada juga pembudidayaan kepiting bakau di daerah pesisir Bantul dengan menggunakan teknologi *crab ball*.

Tak hanya produk, UNY pun mengembangkan pelatihan jasa, dalam hal ini *sport massage*. Karena kami punya jurusan pendidikan olahraga, maka para *tenant* diajari melakukan *sport massage* untuk kebugaran. Harapan kami, upaya-upaya yang kami lakukan bisa mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN BEA CUKAI

TRANSFER KE
REKENING PRIBADI

MEMAKAI IDENTITAS
FOTO PEGAWAI

SERING DISERTAI
ANCAMAN

HUBUNGI BRAVO BEA CUKAI

1500 225

linktr.ee/bravobeacukai

www.beacukai.go.id

f i t @beacukaiRI



Kata Mereka



Oki Setiana Dewi, Alumni Doktoral UIN Syarif Hidayatullah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan instansi BLU dan saya sebagai alumni merasakan layanan yang sangat prima dan luar biasa, yang merupakan salah satu keunggulan dari instansi BLU.



Nonoy Nurhasanah dan suami, penjual Sorabi Jaya Majalengka
Ekonomi kami dulu pas-pasan. Lalu terpikir bagaimana kalau ada usaha di rumah, jadi kami coba-coba bikin sorabi. Awalnya ada kendala modal. Kebetulan kenalan saya usul mengajukan bantuan pinjaman dari UMi. Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan dari UMi. Kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah bisa terbantu, saya juga bisa memperluas dan memperbesar usaha.



Dina Selviyanti, penjual salad buah, Ternate

Saya berjualan salad buah sejak kuliah, ditawarkan melalui *online* kepada teman-teman. Waktu itu sistemnya saya antar sendiri tanpa biaya tambahan. Kalau malam ada yang ingin pesan, saya sudah tidak ada pengantaran. Suatu hari ketika sedang mengantarkan pesanan, saya melihat Rumah UMi. Saya tertarik dan bertanya apakah sudah terisi semua di tempat itu. Ternyata perlu daftar dulu, jadi saya datang, mengisi formulir, lalu *interview* dan mendapatkannya. Manfaat yang saya rasakan dari segi permodalan salah satunya jadi bisa lebih banyak stok buah. Terima kasih banyak kepada program UMI dari PIP yang telah memberikan pinjaman untuk mengembangkan usaha.



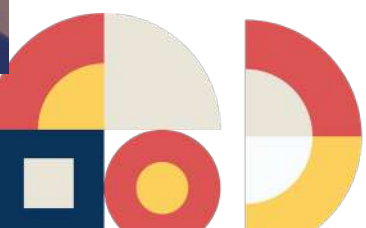
Armadi Saputra, Pasien RSCM

Hadirnya RSCM *online* sangat membantu saya dan keluarga dalam meraih pelayanan kesehatan selama masa pandemi ini. seperti dalam hal konsultasi dan juga mendapatkan obat secara *online*. Terima kasih RSCM telah membantu saya dan keluarga selama masa pandemi ini.



Reny Ayu Wulandari, Awardee LPDP di Wageningen University & Research Belanda

Kami sebagai orang-orang yang berada di daerah mempunyai banyak sekali keterbatasan, termasuk dalam hal informasi dan kemampuan bahasa Inggris. Dulu merasa kuliah di luar negeri seperti ini seperti mimpi untuk kami sebagai anak-anak daerah. Alhamdulillah melalui LPDP ini keinginan kuliah di luar negeri bisa terwujud.





BLU dalam 16 Tahun Perjalanannya

Praktik-praktik terbaik pada pemerintahan biasanya mendekati yang ditemukan dalam sektor privat. Praktik tersebut mereka namakan sebagai pemerintah wirausaha atau entrepreneurial government yang diterjemahkan dalam bentuk agensifikasi di sektor publik.

Oleh: Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pengelolaan keuangan BLU tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya konsep New Public Management (NPM). Hal ini diperkuat kembali ketika Osborne dan Gaebler (1992) memperkenalkan re-inventing the government. Keduanya mendapati bahwa pemerintahan cenderung lamban, sentralistik, dan tidak memiliki regulasi yang efektif.

Konsep BLU yang lahir dari UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama pada pasal 68 dan 69, merupakan implementasi agensifikasi dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya dalam PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagai turunan UU tersebut dinyatakan bahwa BLU merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dengan didasarkan pada efisiensi dan produktivitas. Menurut Mulia P. Nasution, penerapan agensifikasi dilandasi adanya perkembangan kegiatan pemerintah, terutama di sektor kesehatan dan sektor pendidikan yang menyebabkan asas universalitas dalam pengelolaan keuangan negara tidak dapat diterapkan tanpa menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan.

Peran Penting BLU dalam Layanan Publik

BLU memiliki kontribusi yang sangat signifikan pada perekonomian, terlebih pada saat pandemi Covid-19. Transformasi pengelolaan RS menjadi BLU mendorong percepatan layanan

berkualitas dengan biaya lebih murah karena adanya kontrol pemerintah atas tarif layanan dan fleksibilitas untuk mengoptimalkan pengelolaan asetnya. Di sektor pendidikan, bentuk BLU memainkan peranan yang sangat penting, yaitu penyediaan layanan pendidikan tinggi yang dapat dijangkau dan mendorong transformasi pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi di Kemendikbud, kelembagaan BLU merupakan bagian dari transformasi menjadi PTN Badan Hukum yang lebih otonom dan mandiri.

Jejak BLU dalam akselerasi pembangunan infrastruktur juga terlihat melalui upaya mendorong investasi. Untuk mengurangi *backlog* perumahan misalnya, pemerintah meningkatkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah/menengah secara signifikan. Bentuk BLU juga menjadi solusi untuk menangani skema pendanaan untuk pembebasan lahan pada proyek strategis nasional lewat Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), ataupun mengatasi kesenjangan digital lewat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI).

Otonomi, Kontrol, dan Inovasi Berkelanjutan

Otonomi atau fleksibilitas BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Implementasinya dapat mencakup aspek organisasi, manajemen strategis, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan teknis

operasional. Konsep otonomi pada agensi berkaitan pula dengan kontrol pemerintah sebagai *principal*. Fungsi kontrol dari kementerian/ lembaga ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan terbaik, mampu dijangkau, dan terciptanya akuntabilitas keuangan. Sementara kontrol dari pembina keuangan diarahkan pada pengaturan perjanjian kinerja dan kontrol keuangan.

Peningkatan kualitas manajemen SDM dapat didukung oleh indikator kinerja utama berbasis *balance scorecard*. Perubahan ini mendorong transformasi pengelolaan keuangan negara yang menerapkan pola BLU dengan tujuan meningkatkan kinerja kelembagaan, kemandirian pendapatan, mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, optimalisasi pengelolaan aset, pengelolaan SDM yang profesional, perbaikan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas. Dalam jangka pendek, hal ini mendorong BLU untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, diimbangi dengan pemberian remunerasi/ insentif berbasis kinerja. Sedangkan dalam jangka menengah, BLU didorong melakukan *transfer of knowledge* kepada BLU yang berkinerja di bawahnya.

Kementerian Keuangan selaku pembina keuangan BLU senantiasa mendorong inovasi berkelanjutan. Ini terlihat dari penyusunan pedoman penilaian kinerja layanan dan

keuangan pada BLU pendidikan dan kesehatan, penerapan *Key Performance Indicator (KPI)* dengan kontrak kinerja, penyempurnaan aturan dewan pengawas, serta pedoman tarif, pengelolaan aset, dan sistem akuntansi pada awal tahun 2010-an. Kemudian pada tahun 2017, dilakukan modernisasi BLU dengan aplikasi *BLU Integrated Online System (BIOS)* dan *Office Automation (OA)*. Pada 2018, inovasi dilakukan terkait fleksibilitas pengelolaan kas dan investasi, pembiayaan ultra mikro, serta integrasi BIOS dan OA. Tahun 2020 lahir PMK yang menyederhanakan kodifikasi aturan BLU (PMK No. 129/PMK.05/2020) dan pemindahan saldo kas dalam penanganan pandemi Covid-19 (PMK No. 43/PMK.05/2020). Pada tahun 2021 dikembangkan model pengukuran *maturitas* BLU (*BLU Maturity Rating*) yang menunjukkan tingkat kedewasaan organisasi BLU. Inovasi pengelolaan keuangan BLU akan terus berlanjut untuk menjamin tata kelola yang lebih baik.

Pengelolaan keuangan BLU telah memberikan warna yang positif. Namun, pengelolaan BLU tetap memerlukan penyempurnaan untuk menjawab tantangan perubahan. Model bisnis yang bervariasi, disrupsi yang menghadang, dan ekspektasi terhadap layanan yang terus meningkat perlu menjadi catatan bersama untuk berbenah. Semoga pengelolaan BLU senantiasa mampu menjawab tantangan zaman.





BLU Kesehatan, Sebuah Kebutuhan di Papua Barat

Saat ini belum terdapat BLU Kesehatan di Papua Barat. Perubahan menjadi BLU diharapkan membuat RS lebih responsif dalam penyediaan dan pelengkapan sarana dan prasarana, penambahan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan.

Oleh: Bayu Andy Prasetya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat

Sebanyak 23.144 orang tertular dan 357 orang meninggal akibat pandemi Covid-19 di Papua Barat (data Dinkes Provinsi Papua Barat per 1 Desember 2021). Besaran tersebut mencapai 2,04 persen dari populasi. Pemerintah daerah pun telah menerbitkan Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Covid-19 di Papua Barat yang menandai pemberlakuan masa tanggap darurat disertai dengan imbauan pembatasan aktivitas.

Pandemi dan Sosial Ekonomi Regional

Sebagai akibatnya, transaksi jual beli pun menurun. Perekonomian Papua Barat terkontraksi menjadi -1,76 persen (yoy) pada Triwulan III 2021 (data BPS), yang sebelumnya berada pada level -2,1 persen. Tingkat kemiskinan juga meningkat menjadi 21,84 persen.

Foto Finalis Lomba Foto BLU Expo 2021 - Fitri Sapta Nugraha

Penanganan kasus Covid-19 di Papua Barat dilakukan dengan tiga kebijakan utama, yaitu sosialisasi dan edukasi, percepatan vaksinasi, serta peningkatan fasilitas kesehatan. Kebijakan ketiga dirasakan masih belum optimal dan makin terlihat ketika gelombang kedua menerpa. Sebanyak 7.754 kasus baru terjadi bulan Juli 2021, meningkat lebih dari 400 persen dari bulan sebelumnya. Namun, jumlah kesembuhan hanya mencapai 6.212 kasus. Bahkan tempat tidur pasien hanya tersedia 144 unit.

Rumah sakit (RS) di Papua Barat hanya sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 terdapat 21 RS yaitu 7 di Kota Sorong, 5 di Kabupaten Manokwari, dan masing-masing 1 di 9 kabupaten lainnya. Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan bahkan tidak memiliki RS. Tahun 2021, jumlah RS bertambah satu dengan beroperasinya RSUD Provinsi secara terbatas sebagai Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu. Keterbatasan lainnya adalah dalam hal tenaga medis. Tercatat sebanyak 370 dokter bekerja di Papua Barat atau 1 dokter menangani sekitar 3.065 orang.

BLU Solusi Keterbatasan

Peningkatan fasilitas kesehatan membutuhkan dorongan ekstra. Perubahan RS menjadi bentuk Satuan BLU dapat membantu. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis

yang fleksibel membuat BLU mampu meningkatkan kapasitas dengan cepat.

Belum terdapat BLU Kesehatan di Papua Barat. Padahal, banyak RS yang memenuhi persyaratan seperti RS Angkatan Laut (Rumkital) Dr. Azhar Zahir, RS Tipe D di Kabupaten Manokwari. Selama tahun 2020, Rumkital mampu mencatatkan pendapatan sebesar Rp15,86 miliar atau tumbuh 17,82 persen (yoy). Jumlah tersebut kembali meningkat sepanjang sepuluh bulan tahun 2021, menjadi Rp47,79 miliar. Pasien rawat inap selama tahun 2020 sebanyak 3.874 orang, sedangkan rawat jalan 4.079 orang. Pasien dirawat oleh tenaga kesehatan yang terbatas, yaitu 12 dokter umum, 10 dokter spesialis (penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, anak, dan bedah), 1 dokter gigi, 11 bidan, dan 54 perawat. Selama pandemi, Rumkital tetap difungsikan melalui 4 poli sambil melayani pasien Covid-19.

Perubahan menjadi BLU diharapkan membuat Rumkital lebih responsif dalam penyediaan dan pelengkapan sarana dan prasarana, penambahan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan. RS akan didukung dengan kemudahan pengelolaan keuangan seperti penentuan tarif yang fleksibel, pendapatan yang bisa langsung digunakan, serta target kinerja yang harus dicapai. Muaranya secara khusus adalah peningkatan fasilitas RS, dan secara umum adalah peningkatan kapasitas kesehatan regional.

Peran Kanwil DJPb

Pandemi Covid-19 harus menjadi pembelajaran untuk berubah. Ini mendasari perlunya mengubah tata kelola RS menjadi BLU Kesehatan untuk mendukung percepatan penyelesaian pandemi. Namun, perubahan menjadi BLU memerlukan waktu dan komitmen yang kuat akselerasi proses bisa makin mudah dengan dukungan Kementerian Keuangan (c.q Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU DJPb) sebagai regulator dan supervisor.

Kanwil DJPb dapat melakukan pendampingan khususnya dalam hal administratif. Pengelolaan BLU pun dapat relatif lebih mudah dengan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan supervisi oleh Kanwil DJPb.

Harapannya, satker BLU dapat memberikan layanan publik terbaik yang *affordable*, *available*, dan *sustainable* serta tidak *profit oriented* untuk mendorong akselerasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, juga peningkatan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.



Fleksibilitas BLU Untuk Peningkatan Layanan

Pemerintah membentuk BLU untuk mendongkrak kualitas layanan agar memenuhi tujuan bernegara. Maka, BLU diberi beberapa fleksibilitas, mulai fleksibilitas pendapatan dan belanja, remunerasi, pengelolaan kas dan utang, hingga keleluasaan pengadaan barang/jasa.

Oleh: Eko Hartono Hadi, Kepala Bidang P APK Kanwil DJPb Nusa Tenggara Timur

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya kesehatan. Sedangkan mencerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan pendidikan yang memadai dan merata. Layanan pemerintah dalam dua bidang tersebut masih harus terus dibenahi.

Salah satu solusinya adalah pengelolaan secara profesional. Instansi pemerintah, terutama yang memberikan layanan kepada masyarakat, perlu dikelola secara fleksibel. David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public*

Sector menyampaikan bahwa salah satu konsep dari *reinventing government* adalah mewirausahakan pemerintah (*enterprising government*). Di sini, Pemerintah mempunyai wakil atau agen yaitu Badan Layanan Umum (BLU).

Pemerintah membentuk BLU untuk mendongkrak kualitas layanan agar memenuhi tujuan bernegara. Maka, BLU diberi beberapa fleksibilitas.

Fleksibilitas Pendapatan dan Belanja

Pendapatan BLU masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Secara umum PNBP harus disetorkan ke kas negara. Sebelum dapat menggunakan PNBP, satker harus memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Untuk satker PNBP terpusat, penggunaan PNBP menunggu lagi terbitnya surat Maksimal Pencairan (MP). Untuk mencairkan PNBP, satker menggunakan mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D).

Pada satker BLU, pendapatan dapat digunakan langsung untuk membiayai kebutuhan operasional dan layanan sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Untuk mencatat pendapatan dan belanja yang bersumber dari pendapatan BLU, satker cukup mengajukan pengesahan kepada KPPN maksimal setiap triwulan. Dengan pemangkasan mekanisme ini, diharapkan layanan pun lebih cepat. Misalnya, seharusnya tidak ada lagi keterlambatan pengadaan obat-obatan serta pembayaran tenaga medis di rumah sakit.

Dari segi belanja, BLU dapat menggunakan saldo awal kas yang pendapatan tahun berjalan lebih kecil dibandingkan belanjanya. Ini berbeda dengan satker PNBPN yang harus menyetorkan seluruh pendapatannya dan mengajukan pencairan PNBPN jika melakukan belanja.

Selain itu terdapat pola anggaran fleksibel sehingga BLU dapat melakukan belanja melebihi RBA sebesar persentase ambang batas yang telah ditetapkan. Pola anggaran fleksibel dapat diterapkan jika pendapatan telah melebihi yang ditargetkan sementara belanja BLU akan melebihi RBA. Ini hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari PNBPN BLU. Fleksibilitas belanja tersebut dapat mendongkrak kinerja layanan satker BLU.

Pengelolaan Kas dan Utang BLU

Dalam rangka pengelolaan kas BLU, satker BLU dapat membuka beberapa rekening yaitu: rekening operasional BLU (dapat berupa rekening operasional penerimaan BLU dan rekening operasional pengeluaran BLU), rekening dana kelolaan BLU, dan rekening pengelolaan kas BLU. Pembukaan rekening yang beragam tersebut

dimaksudkan agar BLU dapat mengelola pendapatannya dengan baik dan melakukan efisiensi belanjanya secara optimal. Sebagai contoh adalah satker BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang menggunakan rekening dana kelolaan untuk menampung dana yang diperoleh dari APBN, sementara bunga jasa perbankan dan bunga atas penyaluran dana ditampung pada rekening operasional penerimaan. Adapun seluruh operasional BLU dikeluarkan melalui rekening operasional pengeluaran.

Rekening operasional BLU digunakan untuk menampung dana operasional satker BLU, baik penerimaan maupun pengeluaran. Untuk alasan efisiensi, satker BLU dapat menggabungkan rekening penerimaan dan pengeluaran BLU pada satu rekening saja. Rekening operasional BLU ini pada prinsipnya sama dengan yang dapat dimiliki oleh satker PNBPN. Rekening dana kelolaan BLU digunakan khusus untuk menampung dana kelolaan bagi satker BLU yang memiliki karakter sebagai pengelola dana tertentu atau menampung dana yang belum sepenuhnya menjadi haknya. Sementara itu, rekening pengelolaan kas BLU digunakan untuk menampung kelebihan kas yang dimiliki oleh satker BLU dan satker BLU tersebut ingin melakukan optimalisasi kelebihan kas tersebut. Tujuan dari dibukanya rekening ini adalah untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi dibandingkan *return* jika kas BLU ditaruh pada rekening operasional BLU.

Pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dimaksudkan antara lain untuk memberikan ruang bagi satker BLU untuk melakukan investasi jangka pendek. Investasi tersebut dilakukan untuk optimalisasi kas melalui

instrumen keuangan dengan risiko rendah, seperti *deposit on call* atau deposito berjangka pada bank umum. Meskipun fleksibilitas pengelolaan kas berupa investasi jangka pendek diberikan kepada satker BLU, pemimpin BLU harus memiliki kebijakan investasi jangka pendek yang baik. Dengan adanya fleksibilitas pengelolaan kas ini, diharapkan satker BLU dapat memperoleh tambahan pendapatan BLU dari sumber lain.

Satker BLU juga dapat mengadakan pinjaman jangka pendek guna menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran. Pinjaman jangka pendek ini harus untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak atas kegiatan yang tidak dapat ditunda.

Keleluasaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Remunerasi

Guna mempercepat proses pengadaan barang/jasa, satker BLU dapat mengatur sendiri ketentuannya dengan tetap mengikuti prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan praktik bisnis yang sehat, serta diiringi pengawasan ketat.

Satker BLU pun diberi peluang memberikan remunerasi lebih, jika dan hanya jika kemampuan keuangan mencukupi. Pemberian remunerasi diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan layanan.

Dengan banyaknya fleksibilitas BLU, tidak mustahil tujuan bernegara akan tercapai. Namun, pembinaan tetap menjadi faktor penting, baik pembinaan teknis oleh Kementerian Negara/Lembaga Teknis maupun pengelolaan keuangan oleh Kementerian Keuangan.

PERAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)



01

Public Service Reform

Membangun instansi pemerintah yang modern dengan prinsip customer and outcome oriented yang kuat

02

Agent of Development

Pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan di bidang kesehatan, pendidikan, pengelolaan dana, pengelolaan kawasan, pengelolaan barang/jasa lainnya

03

Kontributor Perekonomian

mendukung rencana kerja pemerintah dan prioritas nasional

04

Revenue Contributor

kontribusi terhadap PDB dan PNBPN Nasional

Tarif dan Remunerasi, Pendukung Akselerasi Layanan BLU

Tarif dan remunerasi diberikan sebagai bagian dari skenario bahwa BLU akan lebih tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan tarif dan remunerasi ini untuk berakselerasi dalam peningkatan layanan publiknya.

Oleh: Muhammad Rusna, Kasubdit Tarif, Remunerasi, dan Informasi Direktorat PPKBLU

Di antara sekian banyak fleksibilitas yang dimiliki oleh satker Badan Layanan Umum (BLU), tarif dan remunerasi boleh dibilang adalah fiturnya yang paling menarik. Baik dari sisi BLU-nya sendiri maupun dari sisi owner atau pembinanya.

Tarif dan remunerasi diberikan sebagai bagian dari skenario bahwa BLU akan lebih tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan tarif dan remunerasi ini untuk berakselerasi dalam peningkatan layanan publiknya. Agar manfaat publik ini benar-benar terjadi, maka terdapat prinsip dan spirit pada penetapan tarif dan remunerasi sebuah BLU.

Fleksibilitas yang Mendukung Kemanfaatan Publik

Sebagai salah satu agen negara penyedia layanan publik, BLU menetapkan besaran harga yang akan dibayar oleh masyarakat pengguna jasanya setelah melalui uji kepatutan, daya beli, dan keberpihakan. Khusus untuk keberpihakan ini maka BLU selalu diberi ruang, bahkan didorong untuk berkontribusi untuk para penggunanya yang berasal dari kalangan tidak beruntung. Di sisi lain, BLU juga diizinkan untuk menerapkan tarif *cost plus* untuk para penggunanya yang berasal dari segmen menengah ke atas. Hal ini selain sebagai bagian dari tujuan mewujudkan aspek keadilan, juga agar BLU juga memiliki ruang untuk pengembangan kualitas layanannya.

Berbeda dengan satker biasa, penghasilan pegawai BLU, yang tidak mendapat alokasi tunjangan kinerja dari rupiah murni (RM) lagi, sangat terkoneksi dengan capaian kinerjanya. Setiap pimpinan BLU mengikat kontrak kinerjanya dengan Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Hal inilah yang menjadi basis remunerasi BLU. Secara teknis, format remunerasi juga menitikberatkan pada capaian kinerja. Proporsi yang dibangun adalah 30:70, dengan 70 persen adalah variabel terhadap capaian kinerja setiap stafnya, sedangkan yang 30 persen adalah untuk porsi posisi jabatan pegawai yang bersangkutan.

Dengan pemilihan indikator kinerja yang juga besar porsinya dalam hal substansi layanan yaitu sekitar 70 persen untuk indikator teknis dan 30 persen untuk indikator keuangan, desain remunerasi ini memberi pesan yang kuat bahwa setiap BLU diharapkan berorientasi kepada kinerja layanannya, *not business as usual*

Pada akhirnya kedua fleksibilitas tersebut sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan tidaklah *free of charge*, melainkan mesti memberi imbal balik yang sepadan. Penetapan tarif dan remunerasi dihadirkan justru untuk memberdayakan BLU dalam misinya menyediakan layanan terbaik untuk rakyat.



BLU PIP dan Harapan Indonesia Bebas Rentenir

Pemerintah sejatinya telah memiliki program pembiayaan yang dikenal dengan nama Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Masyarakat jadi tak perlu lagi tergiur dengan bualan para rentenir. Mereka juga akan mendapat pendampingan, sehingga dapat naik kelas.

*Oleh: Abd. Gafur, pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
(finalis Lomba Menulis Artikel BLU)*

Dua pria berjaket kulit lengkap dengan tas selempangnya tiba-tiba mendatangi lapak si Mbah, tukang sayur langganan kami. Seorang di antaranya lalu meminta sejumlah uang angsuran kredit. Senyum yang menghiasi wajah Mbah saat melayani pembeli, memudar seketika. Sebuah pemandangan yang lumrah kita temui di pasar-pasar tradisional. Bagaimana mudahnya para tukang tagih rentenir beraksi dan mereka, para pedagang kecil itu, tak berdaya dibuatnya.

Pandemi telah berdampak buruk bagi perekonomian. Pada kondisi keuangan yang seret, mencari pinjaman menjadi solusi, termasuk bagi pedagang kecil. Sayang, mereka tidak memiliki akses permodalan dari perbankan (*bankable*). Kalaupun ada, butuh waktu dan

sejumlah persyaratan. Jurang inilah yang dimanfaatkan para rentenir. Tak heran bisnis haram ini makin menjamur kala pandemi.

Bukan itu saja, jika dulu mereka hanya bisa ditemui di pasar-pasar tradisional, saat ini rentenir makin gencar berinovasi. SMS tawaran pinjaman *online* (pinjol) dan iklan “jasa” mereka gencar berseliweran di linimasa.

Jeratan Gurita Pinjol

Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), sejak tahun 2018 tercatat 4.874 akun pinjol telah ditutup. Untuk tahun 2021 saja, Kemkominfo telah menutup 1.856 akun pinjol. Bisa dibayangkan pertumbuhan pinjol ilegal sedemikian pesatnya, terutama dalam dua tahun terakhir.

Data itu linier dengan jumlah korban yang makin hari makin bertambah. Media daring sering memberitakan penderitaan korban pinjol yang terjebak utang puluhan hingga ratusan juta, padahal utang aslinya jauh di bawah angka itu. Iming-iming proses cepat tanpa agunan harus dibayar dengan bunga yang mencekik leher. Jika tak mampu membayar, siap-siap saja mendapatkan teror dari sekadar ancaman psikis, dipermalukan, hingga ancaman fisik.

Ulah mereka sudah sangat meresahkan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemkominfo untuk “membereskan” pinjol ilegal ini. OJK selaku pengendali jasa keuangan telah melakukan moratorium penerbitan izin *fintech* penerbit pinjol, sedangkan Kemkominfo akan membersihkan ruang digitalnya. Kepolisian pun gencar melakukan penggerebekan sejumlah kantor pinjol.

Namun, penertiban dan penegakan hukum yang dilakukan tampaknya tak cukup membuat jera. Selama para pengusaha kecil merasa tak punya alternatif pembiayaan yang lebih mudah, selama itu pula praktik rentenir akan selalu ada. Pertanyaannya, bagaimana menyelesaikan ini semua?

Pemerintah sejatinya telah memiliki program pembiayaan yang dikenal dengan nama Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program ini terinspirasi dari Grameen Bank di Bangladesh, yang menjadikan inisiatornya, Muhammad Yunus diganjar

penghargaan Nobel pada tahun 2006. Grameen Bank berhasil mengentaskan komunitas perempuan kurang mampu dari jerat kemiskinan melalui pinjaman lunak.

Pembiayaan UMi Sebagai Solusi

Program UMi diluncurkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017 dengan konsep pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari APBN. Sebagai pengelolanya adalah Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP). UMi memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya penyaluran dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang tidak mensyaratkan adanya agunan layaknya bank. Plafon pinjaman adalah sebesar Rp10 juta (sesuai dengan PMK Nomor 193 tahun 2020, plafon telah ditingkatkan menjadi Rp20 juta-red). Selain itu, LKBB wajib memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para debitur agar lebih maju dan berkembang. Dengan sejumlah keunggulannya itu, Ditjen Perbendaharaan mencatat sampai dengan Semester I 2021, BLU PIP telah menyalurkan Rp14,75 triliun kepada 4,48 juta pelaku usaha melalui 46 mitra penyalur.

Namun sayangnya, akses informasi yang terbatas dan inklusi keuangan digital masyarakat yang masih rendah menyebabkan informasi seputar UMi belum tersampaikan secara luas. Fakta ini diperkuat dengan data bahwa dari 3,59 juta penerima UMi pada bulan Februari 2021, 82% di antaranya berasal dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, yang relatif mudah mengakses informasi.

Untuk itu, BLU PIP perlu melakukan upaya mempersempit kesenjangan informasi ini dengan sejumlah langkah. Pertama, lebih gencar melakukan *digital marketing* misalnya di media sosial. Kedua, memperluas akses kegiatan pemberdayaan pelaku usaha UMi di luar pulau Jawa. Ketiga, membangun *brand image* sendiri, bukan melalui LKBB mitra seperti saat ini. Harapannya, dengan *brand* sendiri, masyarakat luas lebih mengenal PIP dan UMi-nya sebagai representasi pemerintah yang hadir memberikan solusi pada permasalahan ekonomi yang membelit. Keempat, memperluas peran Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di nusantara. Jadi, peran kantor vertikal DJPb bukan sekadar melakukan *monitoring* dan evaluasi, melainkan juga sebagai agen informasi sekaligus memberikan edukasi.

Akhirnya, problem rentenir apa pun bentuknya perlu diselesaikan bukan hanya dari sisi penegakan hukum, melainkan juga dengan perluasan akses informasi. Masyarakat yang sedang mengalami kesulitan modal usaha jadi tak perlu lagi tergiur dengan bualan para rentenir. Mereka juga akan mendapat pendampingan, sehingga dapat naik kelas dari mikro ke kecil ke kelas menengah. Saat itu terjadi, maka yakinlah suatu saat Indonesia akan terbebas dari jerat-jerat rentenir.



Mempertajam Penilaian Keuangan BLU dari Aspek *Financial Vulnerability*

Jika analisis kerentanan keuangan dapat dimasukkan sebagai tools atau variabel tambahan dalam penilaian kinerja keuangan BLU, hal ini bisa memberikan dampak positif. Dari tools ini dapat diperoleh gambaran bahwa manajemen BLU mengelola unitnya dengan efektif dan efisien.

Oleh: Syahri Azda Putra, Kasi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemda; Kiran, Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C; Cahyo Nugroho, Kasi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara (Finalis DJPb Data Analytics Competition 2021)

Dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) telah disematkan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fleksibilitas dimaksud antara lain terkait dengan pengelolaan pendapatan, kas, piutang,

utang, investasi, barang, remunerasi, dan kepegawaian.

Menteri Keuangan selaku pihak yang bertanggung jawab atas pembinaan keuangan BLU melakukan evaluasi dan penilaian terhadap satker dengan status BLU, terutama sejauh mana satker BLU dengan penerapan PPK BLU-nya telah berhasil meningkatkan

performa baik dari sisi layanan maupun kinerja keuangan. Kemudian sebagai pelaksana pembinaan di lapangan, Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja BLU. Penilaian kinerja keuangan BLU bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan dengan menggunakan aspek keuangan dan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan satker BLU.

Pengukuran Performa BLU

Aspek keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan dan rasio pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU terhadap biaya operasional. Rasio keuangan terdiri atas rasio kas (*cash ratio*), rasio lancar (*current ratio*), periode penagihan piutang (*collection period*), perputaran aset tetap (*fixed asset turnover*), imbalan atas aset tetap (*return on asset*), dan imbalan atas ekuitas (*return on equity*).

Sedangkan aspek kepatuhan pengelolaan BLU meliputi penilaian terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pelaporan keuangan, pengesahan pendapatan dan belanja, penarifan, sistem akuntansi, persetujuan rekening, dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan utang, piutang, barang dan jasa serta barang

inventaris satker berstatus BLU. Atas capaian aspek keuangan dan aspek kepatuhan itu, kemudian dilakukan pemberian penilaian (*scoring*) dan pembobotan yang nantinya secara total diberi status kurang baik, cukup, atau baik.

Terdapat analisis lebih mendalam terhadap kinerja keuangan yang dapat digunakan dalam penilaian, yaitu analisis kerentanan keuangan (*financial vulnerability*). Analisis ini perlu dilakukan untuk mengetahui BLU mana saja yang mengalami kerentanan keuangan dan faktor apa saja yang menyebabkan atau memengaruhi kerentanan tersebut.

Manfaat Analisis Kerentanan Keuangan

Analisis kerentanan keuangan pertama kali digunakan untuk organisasi yang bertujuan mencari keuntungan, diprakarsai oleh Altman (1968). Altman dalam *paper*-nya mengembangkan Z-Score berdasarkan lima variabel yang mempunyai tingkat prediksi tinggi. Model Z-Score masih digunakan baik oleh kaum akademisi maupun para praktisi. Ilmuwan berikutnya adalah Santomero dan Vinso (1977), Ohlson (1980), serta Zmijewski (1984), yang menggunakan *maximum likelihood logit* dan *probit*.

Analisis kerentanan keuangan juga dapat digunakan untuk organisasi nirlaba. Tuckman dan Chang (1991) mengidentifikasi

empat rasio akuntansi yang bisa digunakan sebagai indikasi kerentanan keuangan yaitu sumber pendapatan yang terbatas, *net asset* yang tidak cukup, biaya administrasi yang rendah, dan pendapatan operasional yang rendah. Kemudian Greenlee dan Trussel (2000) yang merupakan pengguna pertama kali konsep rasio Tuckman dan Chang, membangun model prediksi kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) pada organisasi nirlaba.

Jika analisis kerentanan keuangan dapat dimasukkan sebagai *tools* atau variabel tambahan dalam penilaian kinerja keuangan BLU, hal ini bisa memberikan dampak positif dalam pembinaan BLU. Pertama, untuk melihat apakah BLU tersebut benar-benar berkinerja baik berdasarkan praktik-praktik bisnis yang sehat, yang tercermin dari laporan keuangannya. Dari *tools* ini dapat diperoleh gambaran bahwa manajemen BLU mengelola unitnya dengan efektif dan efisien, yang merupakan implementasi dari *enterprising government* dan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan penjelasan PP Nomor 23 Tahun 2005. Kedua, BLU yang berkinerja keuangan baik tentu akan berkontribusi lebih terhadap penerimaan negara. Ketiga, untuk mengevaluasi kinerja BLU; yaitu menelisik apakah layak untuk dipertahankan pada status BLU atau tidak.

CURHAT SAAT ISTIRAHAT

Komik: Sulamto Singih Partono



jangan sampai ada yang tertinggal , satu pun...satu orang pegawaiipun, karena ini menyangkut hajat hidup, serta menjadi salah satu prioritas yang menjadi perhatian secara nasional... **JANGAN LUPA... SAKTI !! MULAI BULAN JANUARI !!**



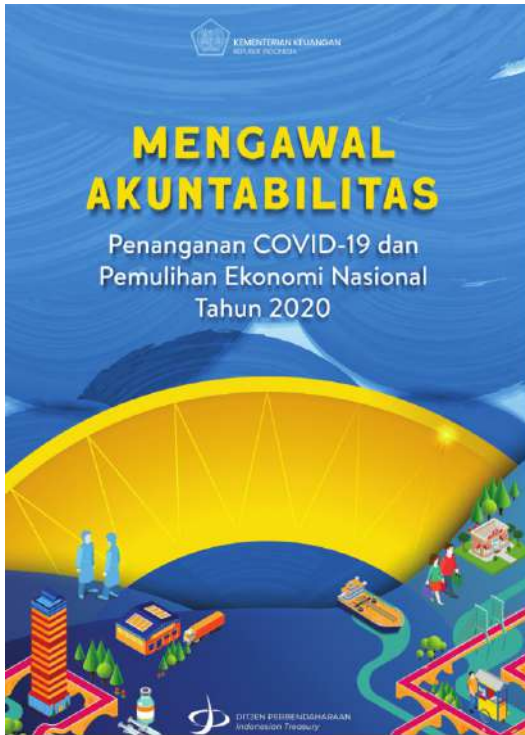
Kirimkan jawaban anda melalui redaksi.treasury@gmail.com dengan subjek KUIS MTI 4. 3 orang pemenang kuis akan diumumkan pada Majalah Treasury Indonesia edisi selanjutnya.

Menurun :

1. Peningkatan kecepatan; percepatan
2. Badan Layanan Umum dari Kementerian Kominfo yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika

Mendatar :

2. Inovasi dibangun oleh Direktorat PPKBLU yang merupakan sistem informasi BLU berbasis teknologi informasi untuk digitalisasi proses bisnis yang terintegrasi, tepat waktu, akurat, dan mengurangi penggunaan kertas
3. Values BLU yang menguatkan identitas BLU sebagai agen pemerintah yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan bagi masyarakat
4. Keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa



Menilik Strategi Pemerintah Tangani Pandemi

Oleh: Laode Atthar Alfikry

Judul : Mengawal Akuntabilitas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020
Penerbit : Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb Kemenkeu
Cetakan : Tahun 2021
Tebal : 255 halaman
ISBN : 978-623-6382-14-1 (cetak)
978-623-6382-15-8 (pdf)

Diawali dari merebaknya Virus Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir tahun 2019 dan kemudian diumumkan WHO sebagai pandemi global, pemerintah mendorong warga untuk melakukan berbagai penyesuaian dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, rutin mencuci tangan dengan sabun, dan sebagainya. Dalam tataran keuangan negara pun terdapat sederetan penyesuaian kebijakan. Selain dalam hal kesehatan, pandemi Covid-19 juga melemahkan perekonomian global. Tercatat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi menjadi sebesar minus 2,07 persen (yoy).

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan buku bertajuk “Mengawal Akuntabilitas, Penanganan Covid-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020”. Melalui buku ini, kita dapat melihat kilas balik sepak terjang pemerintah, khususnya dari perspektif keuangan negara, dalam menghadapi tahun 2020 yang penuh dengan tantangan.

Dari buku ini, kita akan melihat strategi pemerintah dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PC-PEN). Termasuk di antaranya strategi realokasi dan *refocusing* pada APBN 2020 agar anggaran pendapatan dan belanja dapat lebih tanggap terhadap situasi global. Melalui Program PC-PEN,

pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun yang terbagi ke dalam 6 kebijakan sektoral, yaitu Sektor Kesehatan, Sektor Perlindungan Sosial, Sektor Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), Sektor UMKM, Kebijakan Pembiayaan Korporasi, dan Kebijakan Insentif Usaha.

Penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tentunya tidak bisa dilakukan tanpa sinergi yang baik dengan seluruh *stakeholders*. Sinergi seluruh jajaran internal Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pejabat strategis lainnya pun diperlukan. Termasuk sinergi dengan DPR RI dalam rangka penetapan dan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Koordinasi sedini mungkin juga dilakukan dengan BPK yang melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19. Tahun 2020 juga menjadi tahun dicanangkannya program audit *universe* yang dilakukan oleh BPK.

Dengan hadirnya buku ini diharapkan seluruh insan yang mencintai republik ini mampu belajar dari sebuah pengalaman berharga di tahun 2020, tidak saja dalam rangka membuat kebijakan fiskal yang responsif, adaptif, dan tetap pruden, tetapi juga bagaimana pemerintah mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang tercermin dari perolehan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 pada masa pandemi.



A Brief History of Badan Layanan Umum: Indonesia's Semi-Autonomous Agency

By: Aditia, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B
Kanwil DJPb Provinsi Maluku

The root of agency reform in Indonesia can be associated with the new public management (NPM) reforms. The movement to improve the organisational performance of the public service seems to become prevalent in the 1980s and 1990s¹. Driven by the fiscal stresses in the 1970s, the NPM's main characteristics seem to be centred on the notion of 'private is better than public'². Indonesia also tried to improve its public service delivery by introducing 'agency' in one of its public finance reform laws in 2004³.

Since then, the number of the agencies in the central government has been increased from mere 13 agencies in 2005 to 252 agencies in 2021. In terms of revenue contribution, there is a steady growth. In 2020, non-tax revenue from BLU has reached Rp69,3 trillion or one fifth the total of non-tax revenues⁴. In 2011, the portion of BLU's non-tax revenue from the total of non-tax revenues was just 6 per cent.

¹ Kapucu, N 2007, 'New public management: theory, ideology, and practice', in A Farazmand & J Pinkowski (eds.), *Handbook of globalization, governance, and public administration*, Taylor & Francis Group, USA, pp. 889-902.

² Aucoin, P 1990, 'Administrative reform in public management: paradigms, principles, paradoxes, and pendulums', *Governance: An International Journal of Policy and Administration*, vol. 3, no. 2, pp. 115-137.

³ The Law Number 1 Year 2004 Concerning the State Treasury (Republic of Indonesia).

⁴ Central Government Audited Financial Statements 2020.

Public services before the Reformation Era

The practice of public service in Indonesia before the Reformation Era can be traced back to the colonial regulations, particularly the Indonesische Bedrijvenwet (the state enterprise law, hereafter IBW) which was enacted in 1927. The IBW only regulated the state enterprises' administrative aspects without explaining the goal of such enterprises. In 1960, the government amended the IBW in the spirit of 'guided economy', 'synchronising' state enterprises to support development programs⁵. The New Order regime brought another reform to the IBW in 1969. This time, state enterprises were classified into three groups: Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), and Perseroan Terbatas (persero).

After the reform, the government then pruned the form of state enterprises into just two: perum and persero⁶. Both perjan and BLU provide goods and services to the public without prioritising for profit and are allowed to employ professionals, not restricted to civil servants⁷.

The Agency Reform during the Reformation/ Transitional Era

The Asian financial crisis (AFC) in 1997 caused political and social turmoil in Indonesia. The executive government was focused on reform programs proposed by the IMF. One of the reform programs was aimed to improve the public finance management, replacing the outdated colonial regulations, which among them are the Indonesische Comptabiliteitswet (the state

financial management law, hereafter the ICW) and the IBW⁸. The gist of the public finance reform 'is to ensure that public finances are managed in efficient, effective, transparent and accountable manner'⁹.

The State Treasury Law¹⁰, one of the three laws of reformed public finances, introduced a new form of semi-autonomous agency to increase the performance of public service delivery, namely BLU. BLU is referred to as 'government agencies formed to provide goods and/or services to the public without prioritising profit and operate based on efficiency and productivity principles'¹¹. There are at least two ministries that act as 'principals': the respective ministry, according to its services/sector to give (for example the Ministry of Health for hospitals) and the Ministry of Finance, which acts as the steward in terms of financial management.

The reform introduced BLU in 2004, a semi-autonomous agency that has similar characteristics with perjan, a relic from the New Order era, but with more robust governance of control. Since then, the number of BLU has been increasing steadily from a mere 13 in 2005 to 252 in 2021 as the government keeps improving the quality of public service provision.

Disclaimer: This article is the author's opinion and does not represent the views of the Directorate General of Treasury.

⁵ Government Regulation In Lieu of Law Number 19 Year 1960 Concerning State Enterprises (Republic of Indonesia).

⁶ The Law Number 19 Year 2003 Concerning State-Owned Enterprises (Republic of Indonesia).

⁷ Government Regulation Number 6 Year 2000 Concerning Public Service Agencies (Republic of Indonesia).

⁸ Lihat catatan nomor 10 di atas

⁹ Ginting, E 2003, 'The state finance law: overlooked and undervalued', Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 39, no. 3, pp. 353-357.

¹⁰ Lihat catatan nomor 3 di atas.

¹¹ Government Regulation Number 23 Year 2005 Concerning Financial Management of Public Service Agency (Republic of Indonesia).



KPPN Bitung, Penjaga Gerbang Perekonomian di Sulawesi Utara

Bitung merupakan kota pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Jarak tempuh yang hanya satu jam dari Kota Manado menjadikan Bitung sebagai pintu gerbang wilayah utara Indonesia, khususnya perekonomian di pulau Sulawesi. Aksesibilitas yang didukung dengan adanya pelabuhan internasional menjadikan Bitung sebagai kawasan perdagangan di kawasan timur Indonesia. Menjaga perekonomian di kawasan tersebut tetap bergulir lancar, KPPN Bitung hadir.

Dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 16 pegawai, KPPN Bitung memiliki 67 satuan kerja (satker) tersebar selain di Kota Bitung juga pada dua kabupaten yakni Kepulauan Talaud dan Minahasa Utara. Kondisi

yang menantang terdapat pada Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan kawasan paling utara di Indonesia Timur, berbatasan langsung dengan daerah Filipina di bagian utara. Dibutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar untuk melakukan perjalanan. Untuk menuju KPPN saja, satker harus menempuh perjalanan laut selama 14 jam, belum termasuk perjalanan darat dari kantor ke pelabuhan atau dari pelabuhan ke KPPN.

Mengawali layanannya sejak tahun 2006, KPPN Bitung senantiasa hadir sebagai *role model* dalam menuju kantor pelayanan publik yang edukatif, melayani sepenuh hati, responsif, dan berintegritas bagi seluruh mitra layanan. Untuk semakin menguatkan citra layanan yang bersih dan berstandar internasional, maka pada 2018 KPPN Bitung mengukuhkan diri sebagai

satu-satunya kantor layanan publik di kota Bitung yang mendapatkan pengakuan Sertifikat ISO 9001:2015 serta raihan WBK pada 2019 yang menjadi sebuah bukti nyata bahwa KPPN Bitung telah menerapkan standar layanan berbasis digital secara konsisten demi kenyamanan dan keamanan seluruh satker.

Pada tahun 2021, KPPN Bitung mengelola lebih dari Rp1,2 triliun anggaran untuk satker dalam pembangunan di wilayah kerjanya, seperti pembangunan bandara atau pelabuhan di pulau terluar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Melonguane dalam rangka meningkatkan transportasi dan pengangkutan kelapa yang menjadi komoditas utama di pulau tersebut.

Dalam mendukung peran tersebut, KPPN Bitung selalu meningkatkan pelayanan dengan melakukan berbagai upaya yang diawali dengan manajemen perubahan. Salah satu implementasinya adalah melalui “diplomasi kopi”. Disediakkannya *lounge* yang dekat dengan *front office* diharapkan dapat menjadi sarana *soft diplomasi* KPPN Bitung kepada mitra layanan agar suasana diskusi menjadi lebih hangat dan cair sekaligus menghilangkan persepsi atas layanan birokrasi yang kaku dan menjemukan. Inovasi lain yang dilakukan ialah melalui Monitoring Indikator Kinerja (Monika) KPPN Bitung, Ngobrol Permasalahan Instansi (Ngopi) Sore, Bimbingan Khusus (Bimus), atau Kalender Iling (Kerling).

“Suasana birokrasi modern dan bersih yang telah terlaksana dengan baik di KPPN Bitung kami harapkan dapat pula diterapkan oleh mitra kerja kami. Untuk itu kami mengajak dan melaksanakan sinergi dengan mitra kerja kami untuk bersama mewujudkan zona integritas di wilayah masing-masing,” ungkap Kepala KPPN Bitung, Triyanto.

Dengan semangat “Pantera” yang menjadi semboyan khas Bitung berarti tepat sasaran, KPPN Bitung siap menjaga gerbang perekonomian di Sulawesi Utara untuk mewujudkan pembangunan dengan tepat sasaran.



“Tegas dalam penerapan aturan namun lembut dalam pelayanan adalah dua hal yang sangat melekat kuat sebagai citra KPPN Bitung. Semoga dedikasi dan semangat pelayanan KPPN Bitung dapat menjadi inspirasi dan penyemangat bagi kantor pelayanan lainnya,”

Kepala Kejaksaan Negeri Bitung
– **Frenkie Son**



“Terima kasih KPPN Bitung yang selama ini telah membantu mendampingi kami dalam pengelolaan keuangan khususnya penyaluran dana alokasi khusus,”

Plt. Kabid Perbendaharaan dan Kas, Badan Keuangan Minahasa – **Armando P. Nuah**



“Tidak perlu rumit namun manfaatnya sangat dirasakan para mitra kerja seperti kami. Di sinilah sering berbagai persoalan APBN terselesaikan tanpa membuat pusing,”

Kapolres Bitung – **Winardi Prabowo**



KPPN Ternate Membangun Bumi Kie Raha

Provinsi Maluku Utara dikenal sebagai *bumi moloku kie raha* atau bumi Maluku empat gunung yaitu gunung di Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Gunung Gamalama menjadi gunung berapi yang masih aktif di Ternate. Di kaki gunung Gamalama itulah terletak wilayah Kota Ternate. Selain itu, Kota Ternate juga dikelilingi oleh laut dan kepulauan. Tidak heran, moda transportasi kapal sudah menjadi keseharian warga Ternate.

Bisa dikatakan, KPPN Ternate yang berada di wilayah tersebut memiliki kondisi geografis cukup unik sebab berada di antara gunung dan laut sekaligus. Hal tersebut tentu berdampak pada mekanisme penyaluran APBN kepada Satuan Kerja. Wilayah kerja KPPN Ternate cukup luas yang tersebar pada Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Kepulauan Taliabu menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam mengawal pelaksanaan APBN.

Pada tahun 2021 ini, KPPN Ternate memiliki satuan kerja (satker) sebanyak 272 satker di mana kebanyakan dari satker tersebut tidak berada dalam satu pulau dengan KPPN Ternate. Sebanyak 26 pegawai di KPPN Ternate memiliki pengalaman tersendiri dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika melakukan *monitoring* maupun evaluasi kepada satker yang berlokasi cukup sulit untuk didatangi yaitu satker dari Kepulauan Sula dan Taliabu yang membutuhkan perjalanan sekitar 3 hari menggunakan moda transportasi baik darat, laut, dan udara.

Dalam rangka mendekatkan layanan kepada satker di wilayah Halmahera, pada tahun 2015 KPPN Ternate membuka layanan filial di Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera. Uniknya, wilayah tersebut justru merupakan letak ibukota Provinsi Maluku Utara. Awalnya Ternate merupakan ibukota provinsi kemudian dipindahkan ke Sofifi pada tahun 2010. Adanya himbuan dari Gubernur Maluku Utara untuk mendukung pembangunan perekonomian di Ibukota Provinsi tersebut maka dibuka

layanan filial di Sofifi. Jadi KPPN Ternate ialah satu-satunya yang memiliki layanan filial dengan lokasi yang justru berada di ibukota provinsi.

Menjawab tuntutan akan pelayanan publik, KPPN Ternate yang di tahun 2021 ini menyalurkan total DIPA anggaran sejumlah Rp6,2 triliun di wilayah kerjanya telah berbenah dan mempercantik diri demi meningkatkan citra sebagai kantor yang bercirikan pelayanan prima dengan menggunakan konsep *fresh office* dan telah mendeklarasikan motto pelayanan yaitu “Pelayanan Terbaik Untuk Anda”.

Pada tahun 2017, KPPN Ternate yang telah meraih sertifikasi ISO 9001:2015 yang kemudian diusulkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti akselerasi

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan DJPb. Hasil raihan nilai pada seleksi akselerasi ternyata melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2018, KPPN Ternate ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai perwakilan untuk mengikuti Penilaian WBK oleh Kemenpan-RB. Berkat kerja keras yang cukup panjang selama tahun 2018, KPPN Ternate berhasil meraih predikat WBK dari Kemenpan-RB. Berlanjut ke tahun 2019, setelah meraih WBK, KPPN Ternate melanjutkan dengan memperoleh penilaian WBBM dari Kemenpan-RB.

Untuk menjawab kebutuhan *stakeholder*, KPPN Ternate mempunyai inovasi terkait kepastian waktu layanan yaitu Antrian Tiga Puluh Menit (ATM), Ternate Konversi Lima Menit (Terkomit), dan Ternate Pengawasan Harian (T’Wash)

untuk penerbitan SP2D maksimal 40 menit. Inovasi tersebut diciptakan mengingat ruang layanan *front office* KPPN Ternate yang kecil dan terbatas, sedangkan jumlah satker yang dilayani setiap tahunnya hampir mencapai 300 satker.

Atas upaya tersebut, KPPN Ternate mendapatkan berbagai capaian. “Segala pencapaian yang telah dilakukan dihaturkan dan dipersembahkan hanya kepada Tuhan YME untuk menjadikan negeri ini menjadi lebih baik,” ungkap Kepala KPPN Ternate, Rochmad Arif Tri Setyawan.

Dengan semboyan khas Ternate Mari Moi Ngone Futuru, bersatu kita teguh, KPPN Ternate bersama seluruh stakeholder siap membangun bumi Kie Raha menjadi semakin maju.



“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas layanan yang diberikan KPPN Ternate dalam penyaluran dana APBN sehingga tugas dan fungsi BPK dapat berjalan dengan baik dan lancar.”

**Kepala Perwakilan BPK
Prov. Maluku Utara - M.
Ali Asyhar**



“Terima kasih KPPN Ternate yang telah membantu Polres Ternate dalam pengelolaan anggaran sehingga kami dapat melaksanakan tugas baik dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kota Ternate.”

**Kapolres Ternate - Azhari
Juanda**



“Inovasi yang telah dikembangkan telah membantu kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam pengelolaan keuangan. Sukses terus KPPN Ternate.”

**Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
Utara - Wisnu Baroto**



Menembus Boston University

Abdul Gafur, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C Kanwil DJPb Provinsi Bali

“Saya bersyukur bahwa saya mendapat kesadaran lebih awal bahwa dunia ini luas dan tidak terbatasi patok-patok negara. Awardee beasiswa itu punya kewajiban moral untuk berbuat sebaik-baiknya untuk negara ini.” Abd Gafur

Boston dikenal sebagai kota untuk menimba ilmu karena memiliki lebih dari 100 kampus besar. Wajar jika kemudian Boston menjadi salah satu kota tujuan pelajar dari seluruh dunia. Begitu membanggakan, dari sekian banyak pelajar di sana, salah satu Insan Perbendaharaan, Abd Gafur (35), menjadi lulusan dari Boston University. “Cita-cita untuk kuliah di luar negeri memang sudah lama ada sejak SMA. Sejak itu saya berusaha memperbaiki kemampuan Bahasa Inggris,” ungkap pemuda yang kerap disapa Gaga.

Gaga menceritakan strategi menembus pendidikan di luar negeri telah diupayakan sejak dirinya masih duduk di bangku SMA. Mengingat ke belakang, Gaga bersyukur memiliki kesadaran lebih awal bahwa dunia ini luas dan tidak terbatasi patok-patok negara. Indonesia bukan pusat dunia, sehingga dirinya selalu melihat ke luar, berusaha mengartikan segala sesuatu yang ia ketahui dalam konteks internasional. Paradigma tersebut terus dia bawa hingga kini.

“Dua tahun sejak lulus dari beasiswa S1, saya kembali mulai mencari beasiswa. Saya mengikuti seleksi beasiswa FETA (Financial Education and Training Agency). Ini merupakan beasiswa yang ditawarkan oleh PPSDM Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu RI yang sumber dana beasiswanya berasal dari APBN,” ungkapnya.

Seleksi yang ditempuh pertama kali ialah seleksi administratif. Pada tahap ini, nilai TOEFL dan skor TPA OTO Bappenas juga diperhitungkan. “Saat itu saya mendapatkan nilai TOEFL dan TPA sekitar 600,” ujarnya. Berbekal skor tersebut, Gaga

berhasil melangkah ke tahap berikutnya. “Saya bersyukur bisa mendapatkan nilai TOEFL iBT di posisi ke-5 sehingga bisa bebas memilih region Amerika sesuai impian saya dari awal,” tutur Gaga.

Duduk di bangku pendidikan luar negeri memerlukan beberapa penyesuaian. Gaga yang mengambil Fakultas Hukum di Boston University menceritakan tantangan yang dihadapinya.

“Orang Amerika cenderung selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal sehingga persaingan menjadi sangat ketat, khususnya di kelas-kelas *law school*,” jelas Gaga. Selain itu, load dan tuntutan pelajaran yang tinggi juga mengharuskan untuk membaca ratusan halaman materi pelajaran setiap hari sebelum masuk kelas. Tidak jarang Gaga harus menghabiskan malam harinya untuk membaca materi perkuliahan.

Perjuangan lainnya ialah tentang kondisi finansial. Gaga mengungkapkan, *living allowance* bulanan yang diterima, lebih dari 70% habis untuk membayar sewa tempat tinggal, padahal dirinya masih perlu untuk membeli makanan, membayar biaya telekomunikasi, listrik, dan keperluan sehari-hari lainnya, sedangkan untuk bekerja di Amerika Serikat tidaklah mudah karena VISA tidak mendukung. Satu-satunya cara adalah dengan menghemat biaya *housing*.

Saat ini Gaga ditugaskan sebagai Kepala Seksi pada Kanwil DJPb Provinsi Bali. Baginya, kuliah *law school* di Amerika Serikat merupakan komitmen yang memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Setelah menyelesaikan studi pun, ada kewajiban moral yang harus dilakoninya. “Saya harus selalu ingat bahwa *awardee* beasiswa itu punya kewajiban moral untuk berbuat sebaik-baiknya untuk negara ini,” pungkasnya.

Tegar Upayakan Kualitas Hidup dan Potensi Terbaik Kirana

Begitu memalukan jika manusia sombong, sebab hakikat manusia sungguh lemah dan tidak berdaya. Sedikit saja Sang Maha Kuasa berkehendak membuat bagian kromosomnya hilang, kekacauannya bisa terjadi di seluruh tubuh. “Kirana mengalami mikrodelesi, kelainan pada kromosom yang sangat kecil sekali dan jarang terjadi,” ungkap Wynanda Bagiyo Saputri, ibu dari Kirana.

Wynanda (37) tidak menyangka jika putrinya didiagnosa menderita Pierre Robin Sequence (PRS) dan harus dirawat di rumah sakit selama 27 hari sejak lahir. Lahir pada 2014 di RSAB Harapan Kita, Kirana yang tidak bisa menangis spontan segera dirawat di Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Penanganan sigap dilakukan tim medis beserta pemeriksaan lain untuk mendeteksi kelainan lainnya dengan melakukan USG kepala, rontgen thorax, echo, pemeriksaan mata, serta pemeriksaan laboratorium. “Penanganan Kirana cukup sigap. Saat pulang, kami mendapatkan diagnosis PRS, Penyakit Jantung Bawaan (PJB), dan pendarahan retina,” jelas Wynanda.

Bagi Wynanda, tahun pertama membesarkan Kirana adalah masa-masa terberat. Namun demikian, perjalanan yang harus ditempuh masih sangat panjang. “Karena PRS, Kirana sulit bernafas, makan dan minum. Kirana tidak bisa menyusui ASI secara langsung karena jalan nafasnya akan tertutup,” ungkapnya.

Menjelang satu tahun usianya, Kirana harus menjalani operasi. Bayi mungil itu dibawa ke UGD RSAB Harapan Kita dengan keluhan awal hiperbilirubin dan membawa hasil laboratorium yang menunjukkan fungsi liver yang buruk. Sebagai rumah sakit pemerintah berstatus BLU, RSAB Harapan Kita bergerak cepat menanganinya dengan melakukan pemeriksaan lanjutan USG abdomen sehingga lekas diketahui penyebabnya.

“Saya terkesan sama dokter bedah anak yang menurutku sangat bersahabat. Operasi yang

dilakukan adalah Roux-en-Y dan alhamdulillah berjalan lancar. Pasca operasi, Kirana dirawat di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) lebih dari 24 jam sebelum akhirnya diizinkan untuk dirawat kembali di ruang rawat khusus pasien bedah. Menurut saya fasilitas di sana sudah cukup lengkap,” jelas Wynanda. Di usianya yang hampir 8 tahun, secara umum kondisi Kirana cukup baik, meskipun tumbuh kembang Kirana cukup terlambat. Kirana belum bisa jalan, belum mampu mengucapkan verbal dan belum mandiri, juga belum banyak paham instruksi.



“Yang ingin kami capai adalah Kirana bisa mendapatkan kualitas hidup dan potensi terbaiknya, bagaimana pun kondisinya nanti. Sebab Kirana memiliki kondisi yang rumit. Dia punya “setting” yang berbeda seperti pada masalah sensori dia justru bisa lebih banyak menahan sakit. Toleransi nyerinya tinggi. Kalau kondisi normal, mungkin dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa, tapi Kirana tidak merasakan sakit itu. Kirana memiliki gangguan kecerdasan yang cukup berat sehingga dia selalu tampak gembira, tidak pernah marah meski dihina,” jelas Wynanda.

She’s lucky. Kirana mungkin justru lebih beruntung karena meski hidupnya tampak sulit, tapi dia tidak “dikotori” dengan sifat normal manusia yang negatif seperti iri, dengki, dendam, atau mudah mengeluh. Begitu pesan Wynanda untuk kita semua.

Semilir Anging Mammiri dan Keramahan Khas Bumi Cenderawasih



Dari Bandara Sultan Hasanuddin, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto bersama jajaran bertolak menuju Gedung Keuangan Negara, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (24/11). Kedatangan tersebut disambut antusias dengan penyematan Songkok Bugis dari serat lontar dan benang emas serta kain tenun khas Sulawesi Selatan. Tarian penyambutan pun dipertunjukkan sebagai bentuk penghormatan.

Para pegawai merasa beruntung atas kehadiran Dirjen Perbendaharaan dalam kunjungannya ke Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka dapat mendengarkan arahan dan kiat-kiat Dirjen Perbendaharaan selama bekerja di Kementerian Keuangan.

Di mata jajaran Insan Perbendaharaan di Makassar, Dirjen Perbendaharaan ialah pemimpin yang humanis. Dirjen Perbendaharaan lebih memilih memberikan arahan dan ceramah pada meja dan kursi yang sama dan berdekatan dengan para pegawai sehingga suasana yang diciptakan lebih terasa santai dan nyaman. Selepas acara, para pegawai berbondong-bondong untuk dapat mengabadikan momen bersama dengan Dirjen Perbendaharaan.

Pada sebuah pigura, Dirjen Perbendaharaan menuliskan harapan terhadap jajaran Insan Perbendaharaan di Makassar. “Terus berkarya, berinovasi, dalam mewujudkan DJPB HAnDAL mengawal APBN di Bumi Anging Mammiri.”

Kalimat tersebut bak semilir angin yang menghembuskan semangat bagi segenap jajarannya.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya di Papua (25/11). Yel-yel Kanwil DJPb Provinsi Papua pun menggema diteriakkan oleh para jajaran menyambutnya. “Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya! DJPb HAnDAL, Kanwil Papua LAKI (Luar biasa, Aktif, Kreatif, Inovatif!)”

Tarian Asaibori khas Papua menjadi tarian penyambutan yang disajikan oleh para pegawai lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua. Tarian Asaibori dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan simbol ramah tamah masyarakat Papua kepada tamu (pimpinan) yang berkunjung.

Penyematan Topi Papua (hiasan burung Cendrawasih) dan acara “injak piring” pun dilangsungkan yang menandai bahwa Dirjen Perbendaharaan beserta jajaran diterima dengan penuh keramahan dan kehangatan oleh masyarakat Papua. Injak piring juga menandai bentuk kunjungan pimpinan yang telah singgah ke Tanah Papua sebagai tanah yang diberkahi.

Hadiyanto adalah pribadi yang hangat dan ramah kepada seluruh jajaran pegawai. Banyak hal diceritakannya, termasuk salah satu kisah lucu di balik nama Hadiyanto. Dari seluruh saudaranya, hanya namanya yang menggunakan huruf “O” sebagai syarat bisa menjadi Dirjen Perbendaharaan. Cerita ini langsung disambut dengan tawa spontan dari peserta audiensi.

Dalam acara tersebut terdapat pertanyaan bagaimana menangani trauma bagi pegawai yang mengalami kerusuhan sosial. Jawaban yang diberikan Hadiyanto sangat membantu pegawai dalam memotivasi diri untuk bangkit dari ketakutan dan tetap semangat menyongsong pekerjaan besar di DJPb dengan penuh inovasi.

Tak lupa juga Dirjen Perbendaharaan berpesan bagi para pegawai untuk tetap membangun Tanah Papua dengan penuh rasa cinta karena Tanah Papua adalah tanah yang diberkahi.



PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH



Karakteristik Pembayaran Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Interkoneksi Sistem

Tidak perlu melakukan entry data secara berulang-ulang

Digitalisasi Dokumen

Seluruh proses 100% paperless dan tersedia repositori. Mengurangi biaya penyimpanan dokumen dan biaya kurir

Keamanan Transaksi

Tagihan dari mitra sudah terverifikasi dan dokumen elektronik disahkan oleh pejabat perbendaharaan dengan TTE dan OTP

Pembayaran Terjadwal

Jadwal pembayaran sudah ditentukan sesuai perjanjian dengan mitra, berguna dalam pengelolaan kas negara

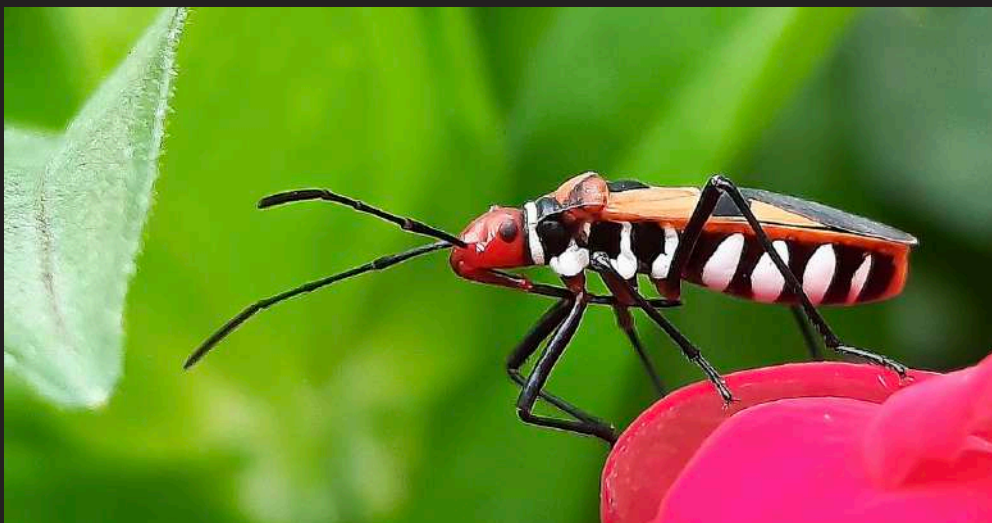
Lensa

Rubrik lensa hadir dengan menampilkan karya-karya foto dari fotografer-fotografer Ditjen Perbendaharaan terutama yang tergabung dalam wadah Treasury Photographer Club (TPC).

Kurator: Tino Adi Prabowo, Mahardika Argha Mariska



Fotografer:
Taufik Surya, KPPN
Jakarta VI



Fotografer:
Suci Purwati, Di-
rektorat PPK BLU



Fotografer:
Tito Bramantyo
Aji, Direktorat SMI



Treasury Fishing Community, Fish ON!

Oleh: Rino Dwiyanto, Agung Cahyono

Joran melengkung, senar meregang, momen inilah yang ditunggu-tunggu para pemancing. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa memancing adalah kegiatan menghabiskan waktu, bahkan ada yang berkata “untuk apa harus capek-capek memancing, kalau ada yang jual ikan di pasar?”

Namun ternyata memancing bukan sebuah kegiatan membunuh waktu. Dikutip dari Merdeka.com, dilansir dari Medical Daily, terdapat sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dari hobi memancing antara lain membangun dan membina hubungan dengan orang lain, meningkatkan kesehatan mental, atau meredakan gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD).

Fishing atau memancing menurut Webster dapat didefinisikan sebagai olah raga (*sport*) atau usaha menangkap ikan. Sebagai olah raga atau hobi, memancing dapat mempersatukan Insan Perbendaharaan di seluruh level organisasi DJPb. Oleh karenanya dibentuk Treasury Fishing Community (TFC).

Latar belakang pendirian TFC dimulai ketika banyaknya komunitas-komunitas kecil yang terbentuk secara alamiah berdasarkan kesamaan hobi memancing. Berdasarkan kesepakatan sebagai hasil musyawarah dari seluruh elemen komunitas tersebut, dicetuskanlah terbentuknya TFC sebagai wadah pemersatu Insan Perbendaharaan yang memiliki kesamaan hobi. Musyawarah tersebut juga berhasil menetapkan *event* Lomba Memancing Galatama TFC sebagai hari jadi TFC yang diselenggarakan pada

tanggal 28 Oktober 2017. Lomba pertama TFC diselenggarakan di Cibinong dengan diikuti oleh 78 peserta dari seluruh lapisan Insan Perbendaharaan baik ASN maupun PPNPN DJPb.

Beberapa *event* yang telah diselenggarakan oleh TFC antara lain Lomba Mancing Galatama TFC kedua tahun 2018 dan Lomba Mancing Galatama Mini Series I 2018. Selain itu, anggota TFC juga berkesempatan mengikuti *event* lainnya seperti Lomba Mancing Selat Sunda. Seiring berjalannya waktu, adanya dampak Pandemi COVID-19 Lomba Mancing Galatama TFC tahun-tahun berikutnya menjadi tertunda.

Selain mengadakan *event* lomba tahunan, TFC juga menyelenggarakan diskusi baik di kantin Kantor Pusat DJPb maupun melalui *group whatsapp*. Diskusi tersebut membahas topik seputar teknik memancing, peralatan memancing, dan topik-topik lainnya. Beragam kegiatan memancing baik di perairan darat maupun di perairan laut dilaporkan secara berkala oleh anggota komunitas di group WA. Kiprah TFC di media sosial juga dapat dilihat di Instagram dengan tagar #treasurymemancing dan Youtube dengan channel Memancing Ala TFC.

Dalam perkembangannya, saat ini TFC memiliki sebaran anggota komunitas yang bertugas di berbagai unit DJPb baik instansi pusat, maupun instansi vertikal seperti Kanwil DJPb dan KPPN.

BADAN LAYANAN UMUM

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Pembiayaan untuk penyediaan layanan, diperoleh dari pajak atau pungutan yang sah dari masyarakat berdasarkan undang-undang. Penerimaan untuk penyediaan layanan tersebut ditampung dalam APBN. Sehingga pengeluaran untuk layanan publik harus melalui APBN. Inilah yang disebut asas universalitas.

Pelayanan publik yang dananya berasal dari APBN, disediakan secara gratis kepada masyarakat. Terutama barang jasa publik (*public goods*), seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan sosial. Penyediaan layanan publik dilakukan oleh kantor atau satuan kerja Pemerintah.

Dalam realitasnya, terdapat kantor atau satuan kerja Pemerintah yang memiliki sumber daya untuk menghasilkan penerimaan dari aktivitasnya atau sumber daya yang dimilikinya. Misalnya, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, dan sejenisnya. Seharusnya penerimaan diperlakukan sebagai PNBPN dan disetor seluruhnya ke kas negara, dan untuk belanjanya harus diajukan ke KPPN untuk dikeluarkan dari kas negara. Namun kemudian, untuk fleksibilitas dan menjamin keberlangsungan layanan serta peningkatan profesionalisme, maka dikenalkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Pada pola pengelolaan keuangan BLU, satuan kerja Pemerintah diberi keleluasaan dan pengecualian dalam mengelola keuangan dan perbendaharaan. Satuan Kerja dapat memungut biaya atas pelayanan, menerima PNBPN, dan menggunakan untuk belanja produksi layanan. Sebagai prasyaratnya, satuan kerja harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti harus memiliki rencana bisnis, tata kelola, SOP, sistem tarif, sistem remunerasi, dan persyaratan lainnya yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Demikianlah kira-kira BLU dari perspektif pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan negara.

Selanjutnya terdapat perspektif BLU yang diinspirasi dari teori *New Public Management*

(NPM) dan teori *Agencification*, atau *special mission*. Dalam pendekatan ini, Satuan Kerja BLU, sengaja dibentuk sebagai penugasan khusus oleh Pemerintah. Baik untuk memberikan layanan publik, maupun untuk penugasan strategis. Satuan kerja tersebut kemudian melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLU sejak peraturan perundangan pembentukannya.

Dalam konteks demikian, selalu terdapat isu menarik dalam perkembangan BLU. Pada satu sisi, BLU merupakan solusi dan terobosan untuk membentuk organ Pemerintah yang profesional, modern, berkinerja tinggi, dengan tetap berorientasi memberikan layanan publik prima. Pada sisi lain, pemberian fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, BLU harus dipastikan dapat mengelola keuangan dengan profesional, efisien, dan optimal untuk kemandirian pendanaan bahkan ekspansi bisnis. Oleh karena itu, BLU harus dikawal ketat target kinerja layanan dan target kinerja keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas BLU ke depan, terdapat beberapa posisi yang dapat diambil Ditjen Perbendaharaan: *pertama*, melakukan *revisit design* BLU ke depan, bagaimana bentuk BLU yang ideal untuk peningkatan kinerja layanan publik yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi; *kedua*, memastikan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan keuangan BLU yang terhubung dalam *integrated treasury*; *ketiga*, penajaman peran sebagai regulator melalui pengembangan kebijakan yang lebih strategis, simplifikasi proses bisnis, digitalisasi, dan, *keempat*, penguatan sistem pembinaan, melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi antara kinerja layanan dan kinerja keuangan, berdasarkan suatu kontrak kinerja yang *strong*.

Bagaimanapun, bagi BLU, di balik fleksibilitas terdapat tanggung jawab yang besar. Sehingga dengan *value* BLU SPEED - Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan Digital, BLU menjadi lebih sigap dan lebih cepat dalam memenuhi amanahnya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk kamu yang suka berekspresi.

Menjadi insan yang percaya diri,
Tanpa ragu mencoba
pengalaman baru.

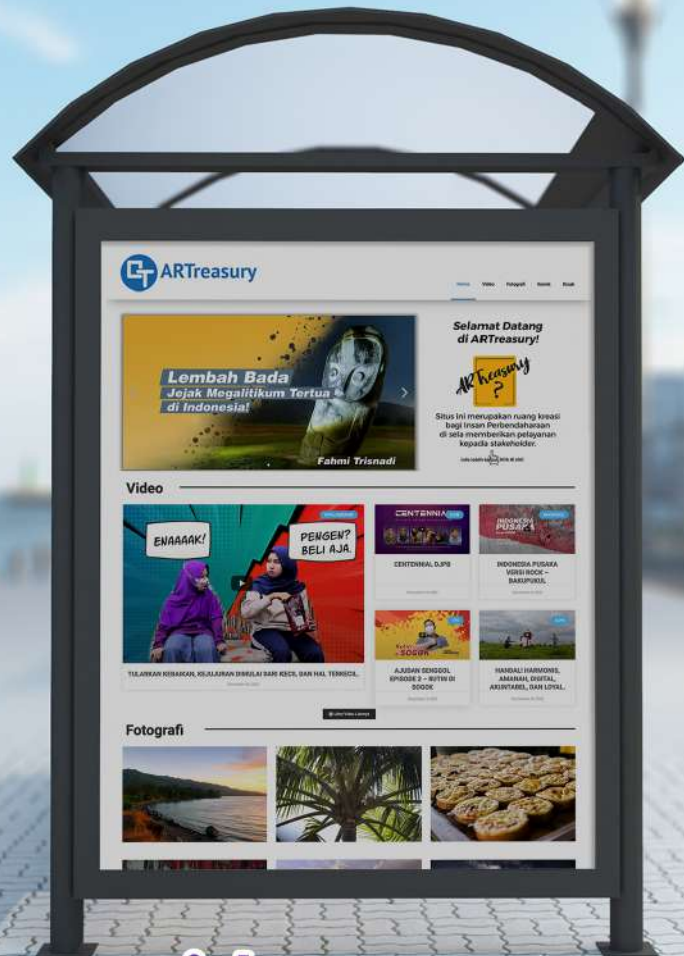
Untuk kamu yang selalu tertantang.

Mencipta sebuah kreasi,
dan tak henti berinovasi.

Yang tak lelah belajar, untuk
tumbuh dan terus berkembang
menjadi insan yang lebih berarti.

Mari kita bersama tumbuh
kembang tiada henti.

Wujudkan kreasi, menjadi inspirasi!



<https://artreasury.id>

Situs ARTreasury merupakan ruang kreasi
bagi Insan Perbendaharaan di sela memberikan pelayanan
kepada stakeholder.

SY AR AT

- Karya kreatif berupa video, foto/gambar/ sketsa/komik/ karikatur, artikel/kisah/cerita fiksi,
- tema karya kreatif bebas, menarik serta mengandung informasi yang bermanfaat, tidak harus berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan,
- konten karya kreatif harus mempertimbangkan norma yang berlaku di masyarakat serta tidak melanggar Kode Etik ASN,
- dikirimkan ke email artreasury21@gmail.com,
- Hak cipta atas karya yang dikirimkan akan tetap menjadi pemilik karya/kontributor.

Untuk file karya yang melebihi batas email (50mb) dapat diunggah di google drive atau penyedia layanan serupa, kemudian dikirimkan tautannya ke email sebagaimana dimaksud.

BLU sebagai agen pemerintah diharapkan mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang kreatif dan inovatif sekaligus tetap konsisten menjaga tata kelola dan akuntabilitas dalam menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto



9 772337 690001